



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2015**



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
 1.1. Latar Belakang I-1
 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
 1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
 1.4. Sistematika Dokumen RKPD I-10
 1.5. Maksud dan Tujuan I-10

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II-1**
 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
 2.1.1. Kondisi Geografis II-1
 2.1.2. Kondisi Demografis II-4
 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-6
 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-17
 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun
 Berjalan dan Realisasi RPJMD II-23
 2.3. Permasalahan Pembangunan II-49

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1**
 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah III-1
 3.2. Kerangka Keuangan Daerah Daerah III-6

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV-5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	: Luas Wilayah Daratan KSB menurut Kecamatan Tahun 2013	II-1
Tabel 2.2.	: Rincian Penggunaan Tanah/Lahan di KSB Tahun 2013	II-2
Tabel 2.3.	: Keadaan Cuaca di KSB Tahun 2012 dan 2013.....	II-2
Tabel 2.4.	: Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan di KSB Tahun 2014	II-3
Tabel 2.5.	: Jumlah Populasi berbagai Jenis Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di KSB Tahun 2013	II-3
Tabel 2.6.	: Potensi Areal, Pemanfaatan dan Produksi Budidaya Laut di KSB Tahun 2013.....	II-3
Tabel 2.7.	: Kondisi Sektor Pertambangan/Penggalan di KSB Tahun 2013	II-4
Tabel 2.8.	: Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Produksi Berbagai Jenis Industri Kecil/Rumah Tangga di KSB Tahun 2013.....	II-4
Tabel 2.9.	: Jumlah SIUP, TDP, Tenaga Kerja dan Investasi Perdagangan di KSB Tahun 2012.....	II-5
Tabel 2.10.	: Keadaan Berbagai Aspek Koperasi di KSB Tahun 2013.....	II-5
Tabel 2.11	: Situasi Pangan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010-2013	II-12
Tabel 2.12	: Sebaran Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Menurut Kecamatan di KSB Tahun 2013	II-13
Tabel 2.13	: Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha di KSB Tahun 2013.....	II-13
Tabel 2.14	: Nama-nama Perusahaan yang Berinvestasi di KSB s.d Tahun 2013.....	II-15
Tabel 2.15	: APK dan APM pada Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2013 Kabupaten Sumbawa Barat (Persen)	II-17
Tabel 2.16	: Jumlah Tenaga Kerja di KSB Tahun 2013.....	II-18
Tabel 2.17	: Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di KSB Tahun 2013	II-19
Tabel 3.1	: PDRB KSB ADH Pada Tahun 2012	III-2
Tabel 2.2	: PDRB KSB ADHK Tahun 2000 pada Tahun 2012	III-2
Tabel 3.3	: Realisasi, Plafon dan Proyeksi Pendapatan Daerah KSB Tahun 2012 s/d Tahun 2015.....	III-8
Tabel 3.4	: Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah KSB Tahun 2012 s/d Tahun 2015.....	III-10
Tabel 3.5	: Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah KSB Tahun 2012-2015	III-11
Tabel 5.1	: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Kabupaten Sumbawa Barat.....	V- 2



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 129 ayat (3) serta Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pedoman penyempurnaan Rancangan (Renja) SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Tambahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 107);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat taktis dengan dimensi perencanaan jangka pendek (tahunan) dan menjadi landasan operasional dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun program pembangunan Tahun 2016.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib mempedomani Peraturan Bupati ini dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan pada Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Mei 2015
BUPATI SUMBAWA BARAT,



ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 30 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat UU tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan PP Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: (1) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; (2) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); (3) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (4) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. *Pendekatan Teknokratis*: yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang implementasinya tercermin dari: (a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; (b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; (c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; (d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; (e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); (f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; (g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; (h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; (i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

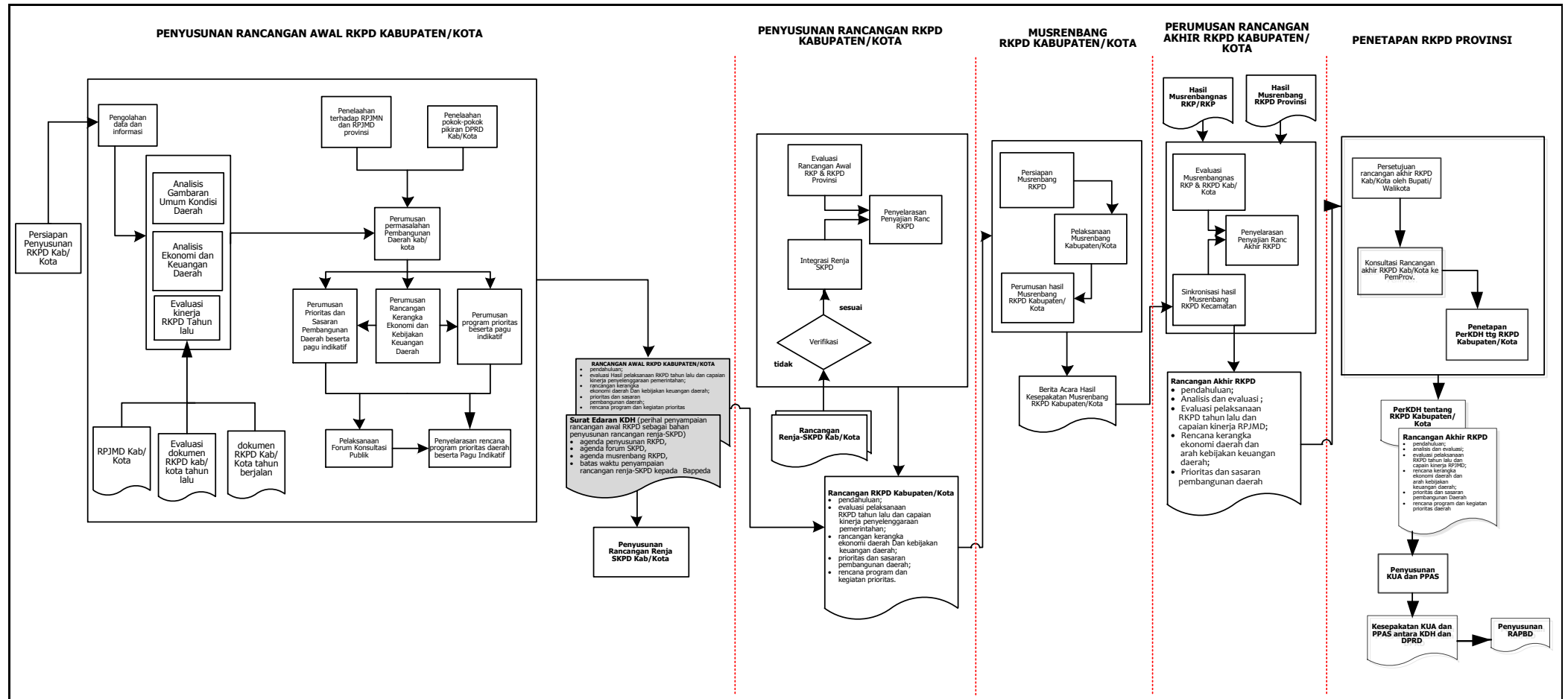
2. *Pendekatan Demokratis dan Partisipatif*: Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: (a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; (b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; (c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; (d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; (e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; (f) Pelibatan media; (g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; dan (h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.
3. *Pendekatan Politis*: Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks

penyusunan RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015 yakni mekanisme rencana kerja transisi sebelum disusunnya RPJMD Tahun 2016-2020 dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2026 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: (a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016; (b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2016; dan (c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

4. *Pendekatan Top Down*: Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: (a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga; (b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Sumbawa Barat; (c) Konsisten dengan RTRW Daerah; (d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; dan (e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
5. *Pendekatan Bottom Up*: Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: (a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Malang; (b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah; dan (c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

Proses penyusunan RKPD KSB Tahun 2016 dapat disajikan pada Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPDKSB Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4340);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom (Lembara Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat T.A. 2015;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 2 Januari 2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten. Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD KSB Tahun

2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD KSB Tahun 2011-2015, yakni pada Bab X: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, serta RPJMN Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan dokumen RKPD KSB Tahun 2016 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten sebagai pedoman dan acuan sebagai berikut:

1. RPJMN Republik Indonesia

RPJMN sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) Dokumen sebagai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

RPJMN tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD KSB tahun 2016, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (*justice for all*), dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*).

2. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014. Beberapa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi NTB yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD KSB tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2014/2015 dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 bagi Kabupaten/Kota.
- b. Mendasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, bahwa tahun 2016 merupakan tahun ketiga Perwujudan Masyarakat Nusa Tenggara Barat

yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi.

- c. Penyusunan RKPD pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (*empowerd*) dan berdaya saing (*competitive*) serta menuju kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat.
- d. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional tahun 2016 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan pembangunan yang: *pro poor* (menanggulangi kemiskinan), *pro job* (memperluas kesempatan kerja), dan *pro growth* (mewujudkan pertumbuhan), serta *pro environment* (menjaga lingkungan), perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals* (MDG's) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).

3. RPJMD KSB

RPJMD KSB Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas untuk periode perencanaan 5 tahunan. RKPD KSB Tahun 2016 merupakan tahun transisi, karena RPJMD KSB Tahun 2011-2015 sudah selesai dilaksanakan. Dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD KSB Tahun 2011-2015 (Bab X: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN), disebutkan bahwa rancangan program dan kegiatan pembangunan satu tahun setelah periode RPJMD berakhir (yaitu tahun 2016) yang dituangkan dalam bentuk **RKPD Tahun 2016**, berisi:

- a. Agenda menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan Tahap II (tahun 2011-2015).
- b. Mengatasi masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani hingga tahun 2015.
- c. Mengantisipasi masalah-masalah pembangunan yang mungkin dihadapi tahun 2016.

Tema Pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD KSB Tahun 2016 adalah “Pemantapan Agroindustri Andalan melalui Pemanfaatan Keunggulan Sumberdaya Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat”.

4. RENJA SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha/swasta. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan SKPD sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD KSB Tahun 2016.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD sebagai berikut:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2016.
- b. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011-2015, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya (tahun 2013/2014), sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- e. Memasukkan usulan kegiatan-kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan untuk perumusan kegiatan pembangunan dalam rancangan Renja SKPD yang mengakomodir usulan/aspirasi masyarakat selaras dengan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Renacna Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KSB Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografis
 - 2.1.2. Kondisi Demografi
 - 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah
- 3.2. KerangkaPendanaan/Keuangan Daerah
 - 3.2.1. KebijakanPendapatan Daerah
 - 3.2.2. KebijakanBelanja Daerah
 - 3.2.3. KebijakanPembiayaan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan SasaranPembangunanDaerah
- 4.2. PrioritasPembangunanDaerah
 - 4.2.1. Program Utama PembangunanDaerah
 - 4.2.2. Kegiatan Utama PembangunanDaerah

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPDKSB Tahun 2016sebagai berikut:

- 1. Menyediakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

2. Menyediakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat, swasta/dunia usaha dan institusi non pemerintah untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016.

Tujuan penyusunan RKPD KSB Tahun 2016 adalah untuk menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, serta menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan KSB secara umum. Gambaran umum menjadi langkah awal penyusunan rencana pembangunan tahun 2016 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah tentang aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1 Letak Geografis

Wilayah daratan KSB tahun 2014 seluas 1.849,02 km² yang tersebar pada delapan kecamatan dengan 57 desa dan tujuh kelurahan. Wilayah laut dan pesisir meliputi: panjang garis pantai 167,8 km, dan luas laut 1.243 km². Sebaran luas wilayah menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Daratan KSB menurut Kecamatan Tahun 2014

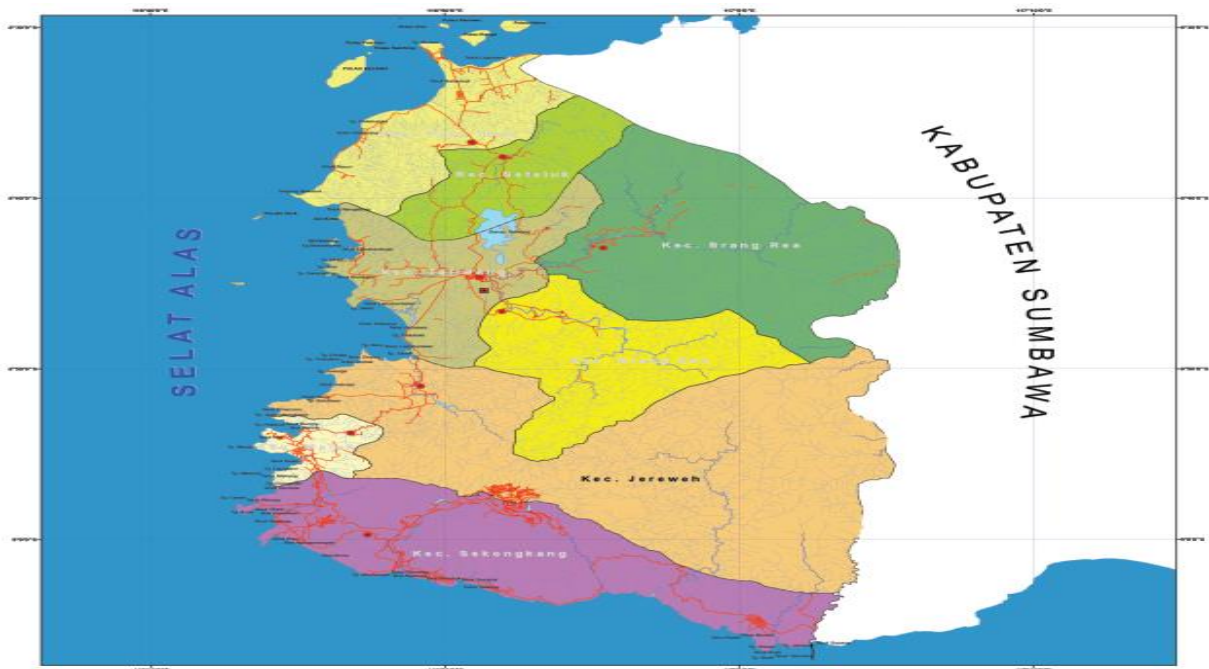
No.	Kecamatan	Luas (ha)	Luas (%)	Jlh Desa/ Kelurahan	Wilayah Pembangunan (WP)
1.	Poto Tano	15.888	8,59	8	WP Utara
2.	Seteluk	23.621	12,77	10	WP Utara
3.	Brang Rea	21.207	11,47	9	WP Tengah
4.	Brang Ene	14.090	7,62	6	WP Tengah
5.	Taliwang	37.593	20,33	8/7	WP Tengah
6.	Jereweh	26.019	14,07	4	WP Selatan
7.	Maluk	9.242	5,00	5	WP Selatan
8.	Sekongkang	37.242	20,14	7	WP Selatan
	T o t a l	184.902	100,00	57/7	-

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Geografis KSB terletak di ujung barat Pulau Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Alas Barat, Batulanteh dan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Barat : Selat Alas.
- Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Geografis KSB yang disajikan dalam Peta Administrasi KSB disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat

2.1.1.2 Klimatologi

Berdasarkan stasiun pencatat hujan di Kabupaten Sumbawa Barat, secara umum turun hujan sepanjang tahun dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Januari sampai April, kemudian terjadi kembali di bulan Oktober sampai Desember kecuali di stasiun pemantau Poto Tano dan Seteluk masing-masing mencatat tidak terdapat hujan pada bulan September dan Agustus. Daerah Seteluk dan sekitarnya memiliki intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan Poto Tano maupun Sekongkang. Curah hujan per bulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Curah Hujan Tiap Bulan Menurut Stasiun Pencatat Tahun 2013 (mm)

Bulan	Poto Tano	Sekongkang	Seteluk
Januari	339	459	511
Februari	141	131	210
Maret	120	199	80
April	173	46	188
Mei	72	71	89
Juni	229	50	104
Juli	36	6	32
Agustus	13	2	0
September	0	40	15
Oktober	101	26	358
November	32	142	229
Desember	339	344	802
Rata-Rata	132,9	126,3	218,2
2013	109,2	174,6	152,1

Temperatur Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013 maksimum mencapai suhu 34,0⁰C, dan temperatur minimum sebesar 21,4⁰C. Rata-rata kelembapan di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 79,8, dengan tekanan udara sebesar 1010,1. Lama penyinaran matahari tahun 2013 sebesar 77,5 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 78,6 persen. Rata-rata kecepatan angin yang bergerak sebesar 5,1 knots, dengan arah angin 240,0 derajat.

Tabel 2.3
Keadaan Cuaca di KSB Tahun 2012 dan 2013

Keadaan cuaca	2012	2013
Temperatur Max (°C)	32,4	34,0
Temperatur Min (°C)	22,7	21,4
Kelembapan	77,5	79,8
Tekanan Udara	1010,4	1010,1
Lama Penyinaran Matarahari (%)	78,6	77,5
Kecepatan Angin rata-rata (knots)	5,2	5,1
Kecepatan angin maksimum (knots)	14,5	14,8
Arah angin (derajat)	240,8	240,0

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Luas tanah/lahan di KSB tahun 2014 adalah 148.902 hektar, berupa lahan sawah dan lahan non sawah, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan di KSB Tahun 2014

No.	Jenis Lahan	2014 (Ha)	2014 (%)
I.	Lahan Sawah		
1	Sawah Irigasi	9,100	77.53
2	Sawah Non Irigasi	2,637	22.47
	<i>Sub Total</i>	<i>11,737</i>	<i>6.35</i>
II.	Lahan Pertanian Bukan Sawah		
1	Tegal/Kebun	6,317	17.60
2	Ladang/Huma	2,394	6.67
3	Lahan sementara yang tidak diusahakan	2,334	6.50
4	Perkebunan, Hutan Rakyat, Tambak, Kolam/Tebat/Lempeng dll	24,853	69.23
	<i>Sub Total</i>	<i>35,898</i>	<i>19.41</i>
III.	Lahan Bukan Pertanian		
1	Pemukiman, Perkantoran, Jalan dll	137,267	100.00
	<i>Sub Total</i>	<i>137,267</i>	<i>74.24</i>
	TOTAL I + II + III	184,902	100.00

Sumber: Dinas HUTBUNTAN KSB, 2015.

Dari Tabel 2.4. diketahui bahwa sebaran penggunaan lahan di KSB tahun 2014 meliputi: lahan sawah 6,35 % yang sebagian besar berupa lahan sawah irigasi dan non irigasi, lahan pertanian bukan sawah sebanyak 19,41 % yang sebagian besar berupa perkebunan, hutan raktat. Sementara itu, lahan bukan pertanian sebanyak 74,24% yang sebagian besar berupa pemukiman, perkantoran dan jalan.

2.1.2. Kondisi Demografi

Kondisi demografis KSB secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, struktur dan kelompok umur penduduk.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk KSB tahun 2013 meningkat 2.559 orang dibandingkan tahun 2012, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota
Rumah Tangga Menurut Kecamatan di KSP Tahun 2013

No.	Kecamatan	Rumah Tangga		Penduduk		Rata-rata ART
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1.	Sekongkang	2.173	7.26	8.431	7.11	3.88
2.	Jereweh	2.068	6.91	8.644	7.29	4.18
3.	Maluk	3.621	12.10	12.252	10.33	3.38
4.	Taliwang	11.299	37.76	45.525	38.38	4.03
5.	Brang Ene	1.361	4.55	5.263	4.44	3.87
6.	Brang Rea	3.143	10.50	12.918	10.89	4.11
7.	Seteluk	3.945	13.18	15.941	13.44	4.04
8.	Poto Tano	2.313	7.73	9.634	8.12	4.17
Jumlah		29.923	100,00	118.608	100,00	3,96

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Jumlah rumah tangga di KSB sebanyak 29.923 Rumah Tangga, dan sebagian besar berada pada Kecamatan Taliwang sebanyak 11.299 Rumah tangga.Kecamatan Taliwang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yakni mencapai 46.505 jiwa, sedangkan Kecamatan Brang Ene adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil dengan 5.379 jiwa.

Wilayah dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah terdapat di Kecamatan Taliwang dengan 11.642 rumah tangga, sedangkan Kecamatan Brang Ene merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga terkecil dengan 1.402 rumah

tangga. Yang harus dipahami adalah walaupun jumlah penduduknya besar tidak otomatis menjadikan jumlah rumah tangga di wilayahnya ikut menjadi besar, namun tergantung besaran rata-rata jumlah anggota rumah tangganya.penduduk Kecamatan Brang Rea lebih banyak dibanding denganKecamatan Maluk, namun jumlah rumah tangganya justru terbalik arahnya.Hal ini dapat menjelaskan dengan mengetahui bahwa ukuran rumah tanggadi Kecamatan Brang Rea lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Maluk.

2.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk KSB tahun 2013 sebanyak 121.167 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,15 % dari tahun 2012. Jumlah rumah tangga sebanyak 30.597 rt dan kepadatan penduduk 65 jiwa/km². Sex ratio (rasio jenis kelamin) pada tahun 2013 mencapai angka 103, relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengertian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 3 persen dari pada jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk KSB mengalami kenaikan, yakni dari 64 jiwa/km² pada tahun 2012 menjadi 66 jiwa/km² pada tahun 2013. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

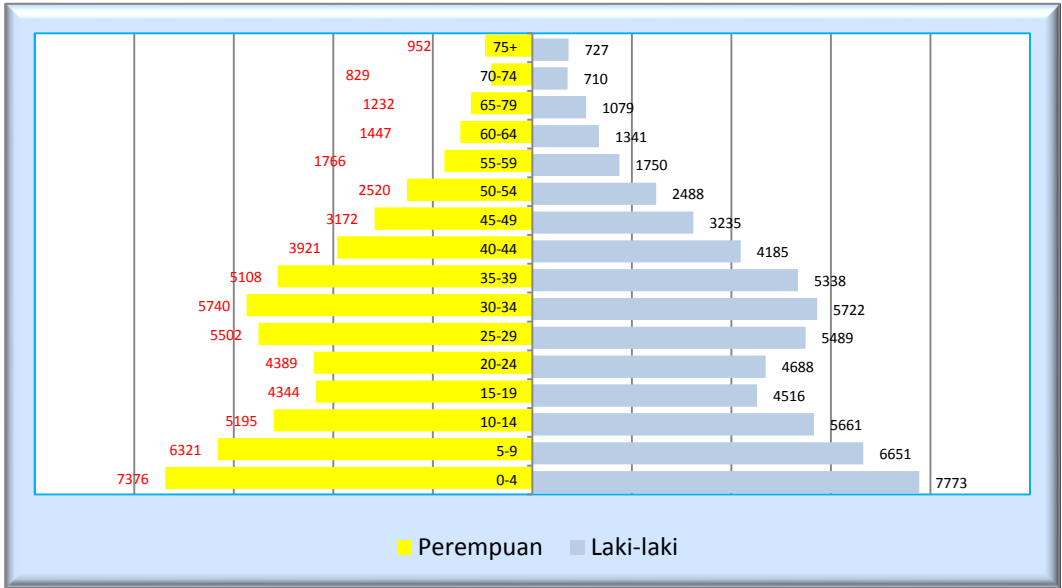
Tabel. 2.6
Penduduk KSB Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk (Jiwa)	116.112	118.608	121.167
2	Sex Rasio (Persen, L/P)	103	103	103
3	Kepadatan (Jiwa/km2)	63	64	66
4	Penduduk/Rmh Tangga (Orang)	3,93	3,96	3,93

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

2.1.2.3 Struktur dan Kelompok Umur

Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di KSB pada tahun 2013 sebanyak 76.661 jiwa, meningkat 1.619 jiwa jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Komposisi penduduk usia produktif menurut jenis kelamin, kaum laki-laki sedikit lebih banyak dari pada jumlah perempuan dengan 38.752 jiwa berbanding 37.909 jiwa. Keadaan tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.2

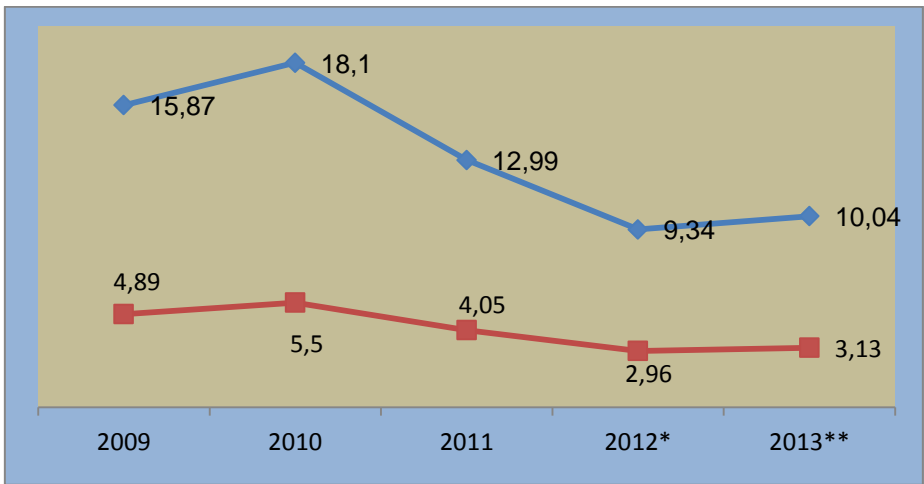
Penduduk KSB Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013(Jiwa)

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. *Petumbuhan PDRB*

PDRB KSB telah mengalami sedikit peningkatan setelah dalam dua tahun terakhir terus mengalami kontraksi. Pada tahun 2013 PDRB KSB sebesar Rp.10,04 trilyun, sedangkan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 9,34 trilyun. Meskipun demikian, nilai PDRB KSB pada tahun 2013 masih jauh dibawah tahun 2009 dan 2010 yang mencapai Rp. 18,1 trilyun, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.3

PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009-2013 (Trilyun Rp.)

Pertumbuhan ekonomi riil dicerminkan oleh PDRB adh konstan (ADHK) tahun 2000. Dari Gambar 2.3. terlihat bahwa pada tahun 2013 PDRB KSB ADHK tahun 2000 sebesar Rp. 3,13 trilyun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari Sembilan sektor dalam PDRB, peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB KSB tahun 2013 berada pada kisaran 87,48 persen. Peranan sektor ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena kenaikan nilai tambah yang diberikan tidak sebanding dengan kenaikan nilai tambah pada sektor lainnya, seperti pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor bangunan.

2. Laju Inflasi

KSB tidak termasuk daerah sampel penghitungan inflasi nasional, Kota Bima menjadi salah satu kota perhitungan inflasi mulai tahun 2008. Keadaan inflasi KSB tahun 2006-2007 diwakili oleh inflasi Kota Mataram, sedangkan tahun 2008-2013 diwakili oleh inflasi gabungan NTB (gabungan inflasi Kota Mataram dan Kota Bima), seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Inflasi Kota Bima dan Kota Mataram Tahun 2006-2012 (persen)

Tahun	Kota Mataram	Kota Bima
2006	4,17	-
2007	8,76	-
2008	13,01	14.36
2009	3,14	4.09
2010	11.07	6.35
2011	6.38	7.19
2012	4,10	3,61
2013	9,27	10,42

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Inflasi Gabungan NTB berfluktuatif setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2012 inflasi gabungan NTB dapat ditekan hingga 4,00. Hal ini menandakan kenaikan harga yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 tidak melonjak tinggi. Pada tahun 2013 inflasi gabungan berada di kisaran 9,51 persen. Inflasi gabungan ini disumbang dari kota mataram 9,27 persen dan 10,42 persen dari kota bima. Kenaikan harga yang hampir mencapai 10 persen tersebut disebabkan oleh harga kebutuhan makanan yang merangsek naik.

Jika dilihat dari inflasi per bulan Kota Mataram dan Kota Bima, dirinci per bulan di tahun 2013, laju inflasi kedua kota tersebut rata-rata memiliki tren inflasi yang

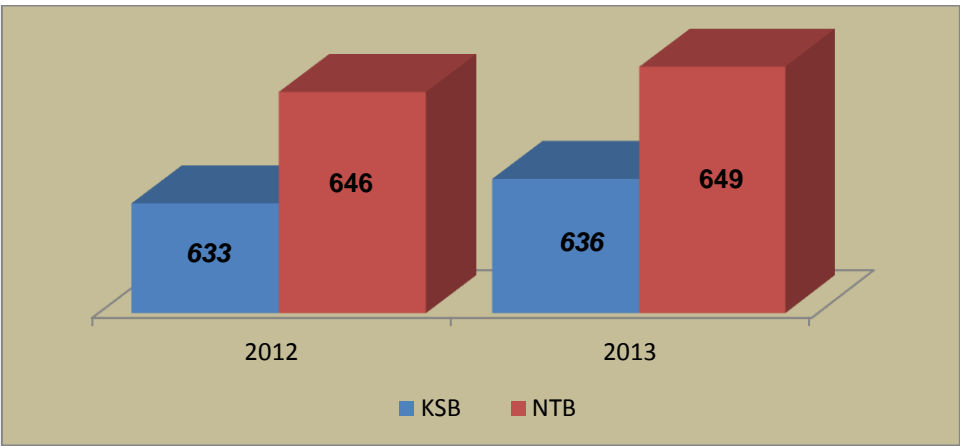
sejalan. Keadaan berbeda hanya terjadi pada Bulan April, Oktober, dan Desember, dimana inflasi di Kota Mataram berbanding terbalik dengan keadaan inflasi di Kota Bima. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mana bertepatan dengan bulan puasa ramadhan dan hari raya idul fitri.

Bila dibandingkan tahun 2012 dan 2013 laju inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, kondisi tahun 2012 cenderung lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan pada kelompok bahan makanan hingga mencapai 17,74 persen.

Kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan signifikan disumbang dari komoditi ikan dan bumbu-bumbuan. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki inflasi masih terhitung rendah yakni dikisaran 4,81 persen. Persentase kenaikan harga mencapai dua digit juga terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi. Kelompok ini mengalami kenaikan hingga 12,55 persen pada tahun 2013.

3. Paritas Daya Beli Masyarakat

Dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk KSB meningkat sebesar Rp. 2.840 menjadi sebesar Rp. 635.600,-. Jika dibandingkan dengan Propinsi NTB, pengeluaran per kapita yang disesuaikan KSB lebih kecil dengan selisih Rp.13.060,-, dimana paritas daya beli Provinsi NTB mencapai Rp.648.660. Keadaan tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

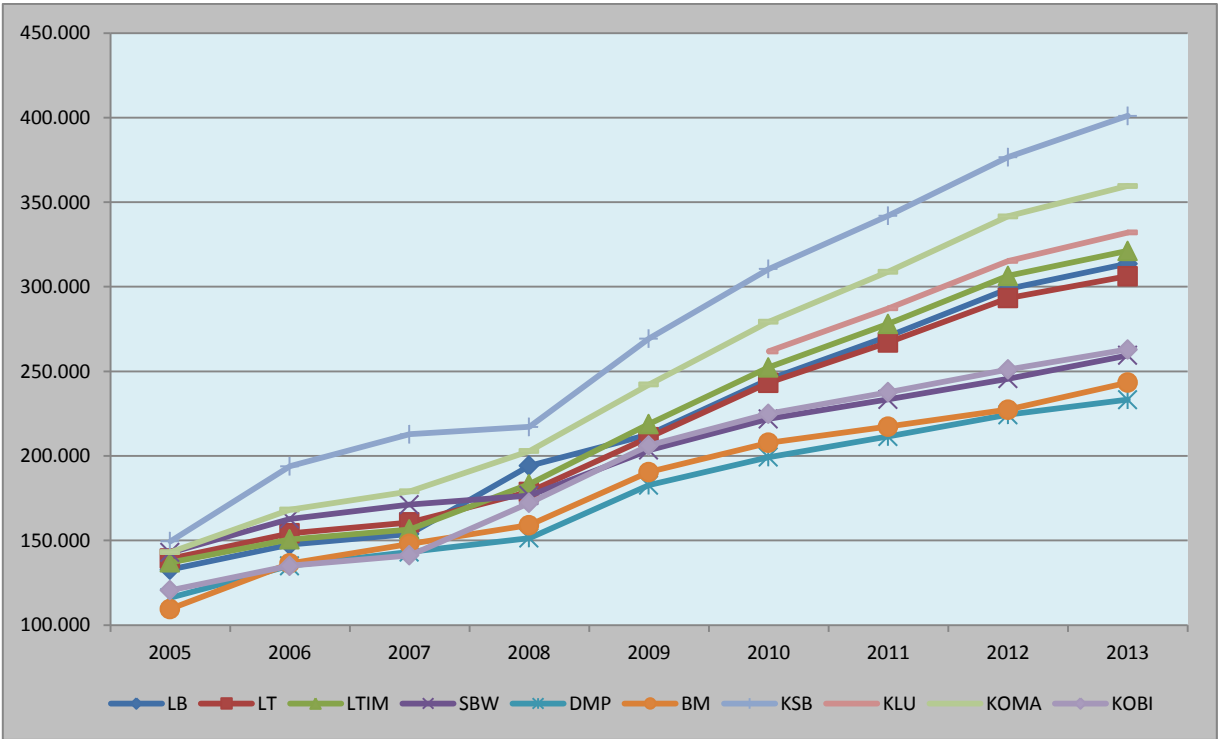
Gambar 2.4
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan KSB dan Propinsi NTB
Tahun 2012-2013 (000 rupiah)

4. Pendapatan Perkapita

Dengan jumlah penduduk KSB tahun 2013 sebanyak 121.167 jiwa, maka PDRB per kapita tahun 2013 sebagai berikut: Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas ADHB Rp78.680.525 per kapita/tahun (Rp 6.566.710 per kapita/bulan) dan ADHK Rp 24.942.316 per kapita/tahun (Rp 2.078.526 perkapita/bulan), sedangkan tanpa termasuk subsektor pertambangan nonmigas ADHB Rp 10.106.464 per kapita/tahun (Rp 842.205 per kapita/bulan) dan ADHKRp 4.364.897 per kapita/tahun (Rp 363.744 per kapita/bulan). Data tersebut menunjukkan pendapatan per kapita penduduk KSB apabila termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas “sangat tinggi”, sedangkan apabila tidak termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas “rendah”. Rata-rata pendapatan per kapita yang disebutkan kedua terakhir (Rp 10.106.464 per kapita/tahun atau Rp 842.205 per kapita/bulan), itulah yang secara nyata menunjukkan pendapatan per kapita penduduk KSB tahun 2013.

5. Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan sosialekonomi penduduk KSB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 17,10 %, menurun dibandingkan tahun 2012 sebesar 17,60 %, atau menurun sebesar 0,50 %, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar.2.5

Garis Kemiskinan KSB dan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2005-2013

6. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013, masih terdapat pengangguran/pencari kerja sebanyak 2,68 % dari jumlah penduduk atau 3,91 % dari jumlah angkatan kerja, serta TPAK 64,26 persen. Dilihat dari sisi lapangan pekerjaan, sebanyak 37,70 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya berkerja pada sektor ekonomi lainnya, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja menurut LapanganUsaha
di KSB Tahun 2014

No.	Kompenen	2014	Persen jlh penddk (%)
1	Angkatan Kerja:	54,494	44.02
a.	Bekerja	51,181	41.35
b.	Menganggur	3,313	2.68
2	Bukan Angkatan Kerja:	30,310	24.49
a.	Sekolah	7,390	5.97
b.	Mengurus RT	17,828	14.40
c.	Lainnya	5,092	4.11
3	Total Tenaga Kerja (1+2)	84,804	68.51
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64.26	-

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2015.

Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di KSB sebanyak 51.181 jiwa (41,35 %), dengan rincian seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja berdasarkan Lapangan Usaha
di KSB Tahun 2014

No	Lapangan Usaha	Orang	Persen
1	Pertanian dalam arti Luas	19,006	37.13
2	Pertambangan dan penggalian	3,395	6.63
3	Industri	2,285	4.47
4	Listrik gas dan air minum	215	0.42
5	Bangunan/jasa konstruksi	2,335	4.56
6	Perdagangan rumah makan dan akoimodasi	9,931	19.40
7	Transportasi pergudangan dan komukasi	1,194	2.33
8	Lembaga keuangan, lembaga persewaan dan jasa perusahaan	537	1.05
9	Jasa kemesyarakatan sosial dan perorangan	12,283	24.00
	Total AK yang Bekerja	51,181	100.00

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2015.

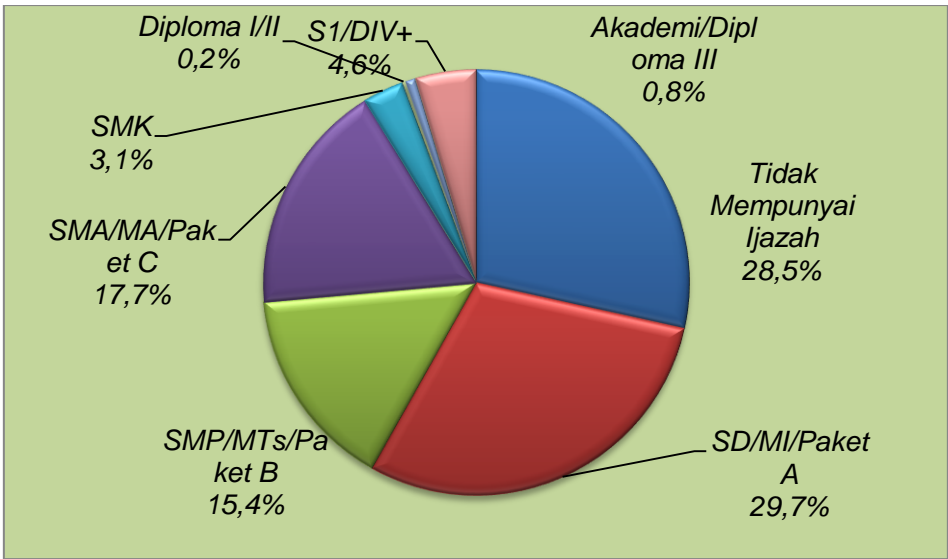
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kesejahteraan Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di KSB tahun 2014 sebagai berikut: anak balita terlantar 50 jiwa, anak terlantar 190 orang, anak korban tindak kekerasan 46 orang, anak cacat 155 orang, wanita rawan sosial ekonomi 642 orang, wanita korban tindak kekerasan 18 orang, lanjut usia terlantar 1.220 orang, tuna daksa 149 orang, tuna netra 93 orang, tuna wicara 91 orang, cacat mental 160 orang, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis 487 orang, bekas nara pidana 132 orang, keluarga fakir-miskin 1.795 KK, keluarga berumah tidak layak huni 649 KK, keluarga bermasalah psikologis 17 KK, dan keluarga rentan 255 KK.

2. Pendidikan

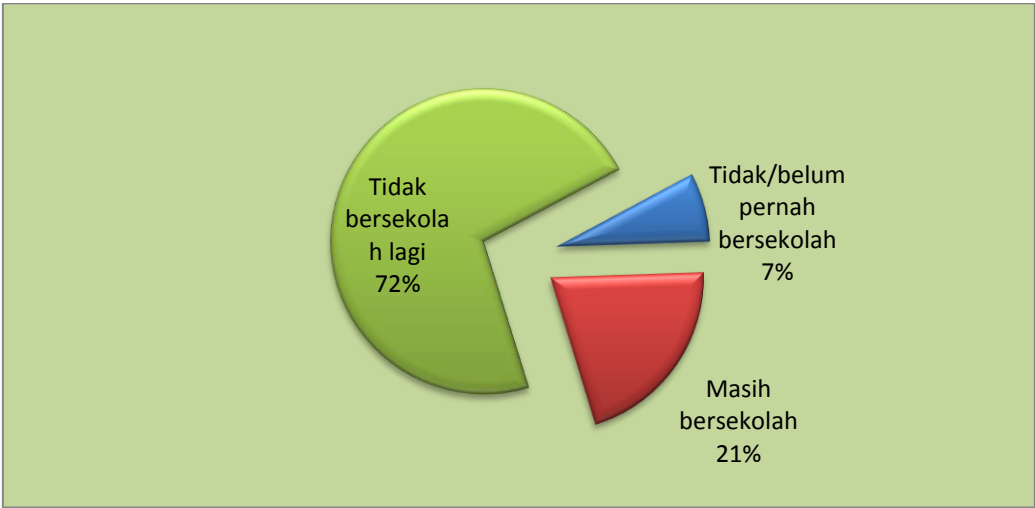
Pada tahun 2013, sebagian besar penduduk KSB yang berusia 11 tahun keatas mempunyai ijazah SD sederajat, yakni mencapai 29,7 persen. Pada posisi kedua dan ketiga adalah mereka yang mempunyai ijazah SMA/MA/paket C dan SMP/MTs/paket B masing-masing dengan persentase 17,7 persen dan 15,4 persen. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya penduduk yang tidak mempunyai ijazah, yakni sebesar 28,5 persen, seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk 11 Tahun Keatas menurut Ijazah yang
ditamatkan di KSB Tahun 2013

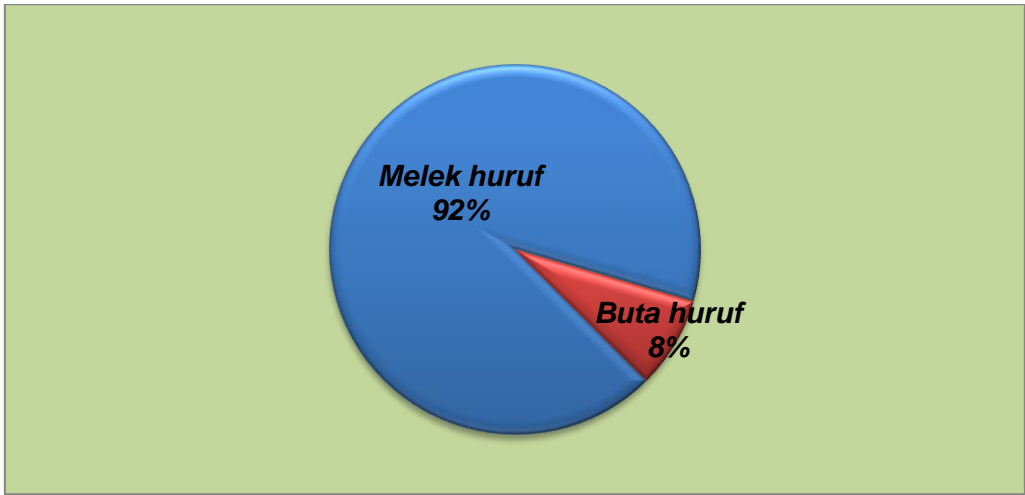
Untuk partisipasi sekolah penduduk KSB usia 10 tahun keatas, sebagian besar (72 persen) sudah pernah mengenyam pendidikan. Dua puluh satu persen lainnya mereka yang masih bersekolah, sedangkan sisanya, sekitar 7 persen penduduk KSB tidak/belum pernah sekolah.Keadaan ini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.7
Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas di KSB Tahun 2013

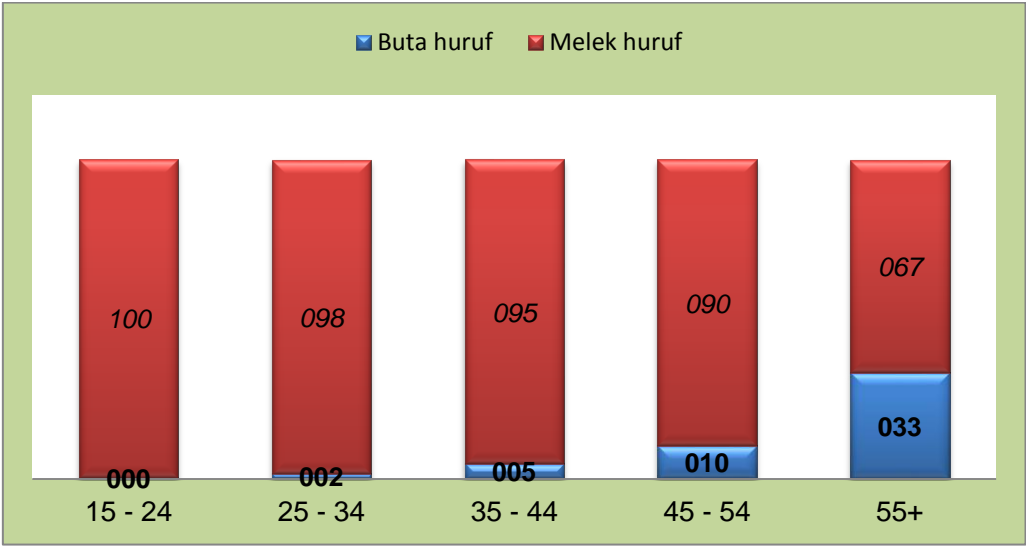
Menurut kemampuan baca tulis, penduduk KSB usia 10 tahun keatas yang masuk dalam kategori melek huruf (mampu baca dan tulis) sebesar 92 persen, sedangkan sisanya 8 persen terdiri dari mereka yang tidak mampu baca dan atau tulis, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Kemampuan Baca Tulis di Sumbawa Barat Tahun 2013

Lebih detail dari pembahasan sebelumnya, jika dilihat menurut kelompok umur, angka buta huruf dewasa cenderung mengalami peningkatan untuk kelompok umur yang lebih dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan pemerintah memang berhasil, setidaknya dari sisi penurunan angka buta hurufnya, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.9
Angka Buta Huruf Dewasa menurut Kelompok Umur
di KSB Tahun 2013

3. Indeks Pembangunan Manusia

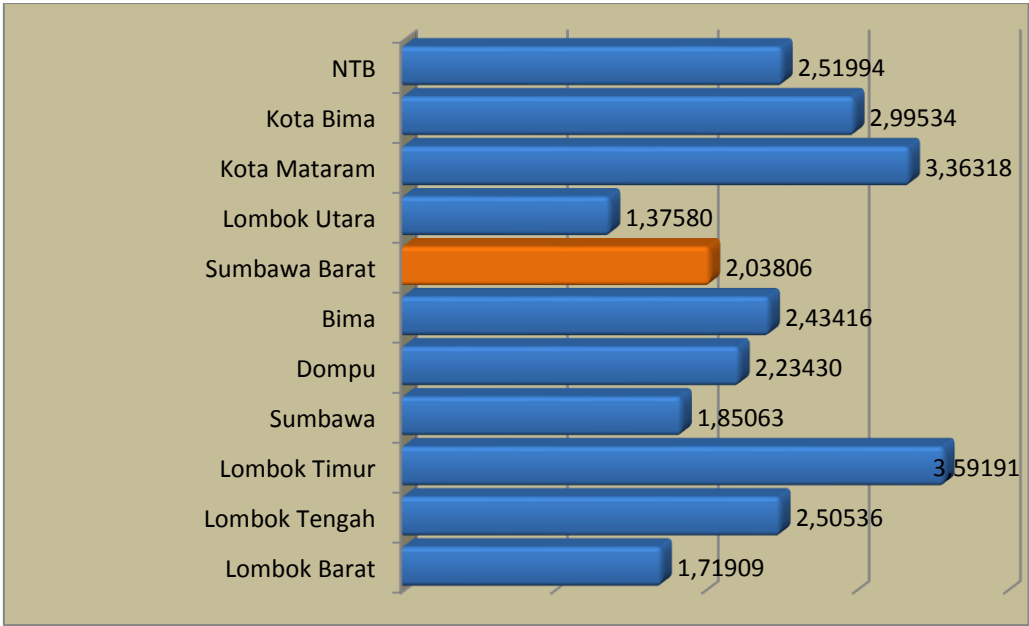
IPM melihat keberhasilan proses pembangunan dari indicator kesehatan, pendidikan, dan paritas daya beli. Kesehatan yang dilihat melalui angka harapan hidup (AHH) penduduk di wilayah tersebut. Pendidikan diukur dari angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan paritas daya beli dihitung melalui kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. IPM KSB dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2013

Kab/Kota	IPM	Peringkat
Lombok Barat	63,82	8
Lombok Tengah	63,51	9
Lombok Timur	65,78	7
Sumbawa	68,06	5
Dompu	68,06	4
Bima	67,34	6
Sumbawa Barat	68,50	3
Lombok Utara	61,90	10
Kota Mataram	74,58	1
Kota Bima	70,73	2
NTB	67,73	33

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

KSB berada di peringkat ke-3 diantara kabupaten/kota lain se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan IPM sebesar 68,50. Dibandingkan dengan Provinsi NTB, IPM KSB masih lebih tinggi dengan selisih indeks 0,77. Untuk reduksi *shortfall*, KSB berada di urutan 7 dengan nilai 2,04 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat, angka IPM dan *shortfall* KSB masih diatas Kabupaten Sumbawa, seperti disajikan pada gambar berikut.

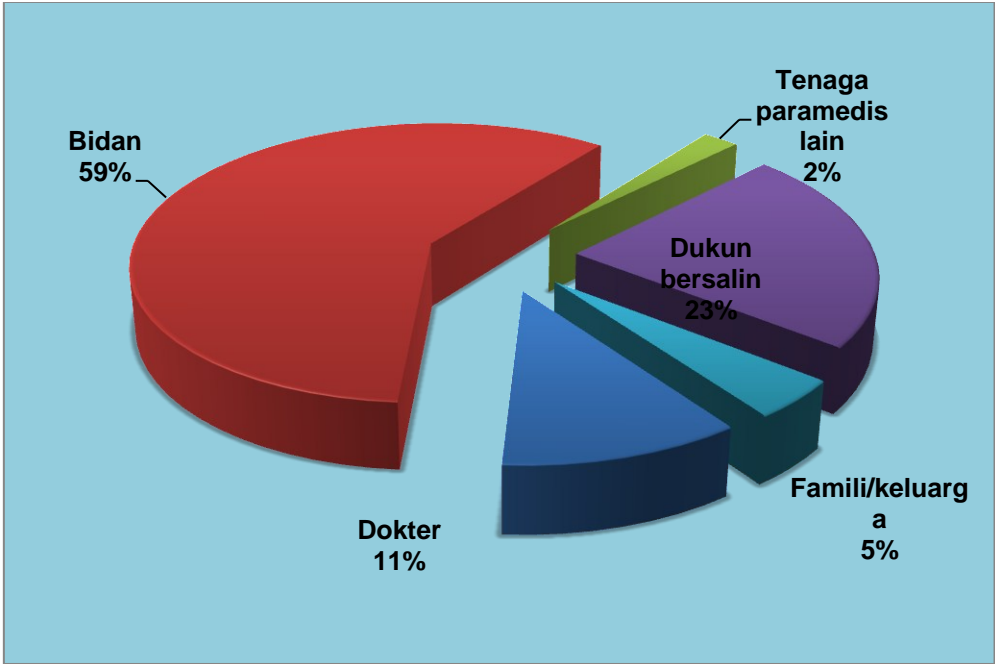


Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.10
Reduksi *Shortfall* IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2013

4. Kondisi Kesehatan

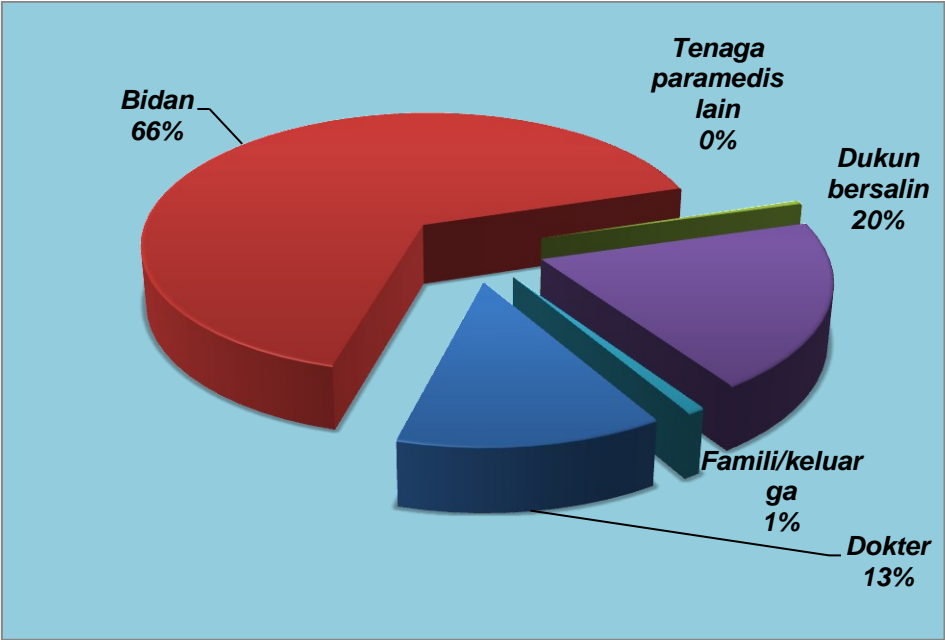
Sebagian besar balita yang lahir di KSB penolong kelahiran pertamanya adalah bidan dengan persentase mencapai 59 persen. Dukun bersalin dan dokter menjadi pilihan kedua dan ketiga dengan persentase masing-masing sebesar 23 persen dan 11 persen. Keadaan ini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.11
Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2013

Dengan urutan yang serupa, penolong kelahiran terakhir bayi yang lahir di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar ditolong oleh Bidan dengan besaran 60 persen. Dukun bersalin dan dokter menjadi pilihan kedua dan ketiga dengan persentase masing-masing sebesar 20 persen dan 13 persen. Keadaan ini disajikan pada gambar berikut.

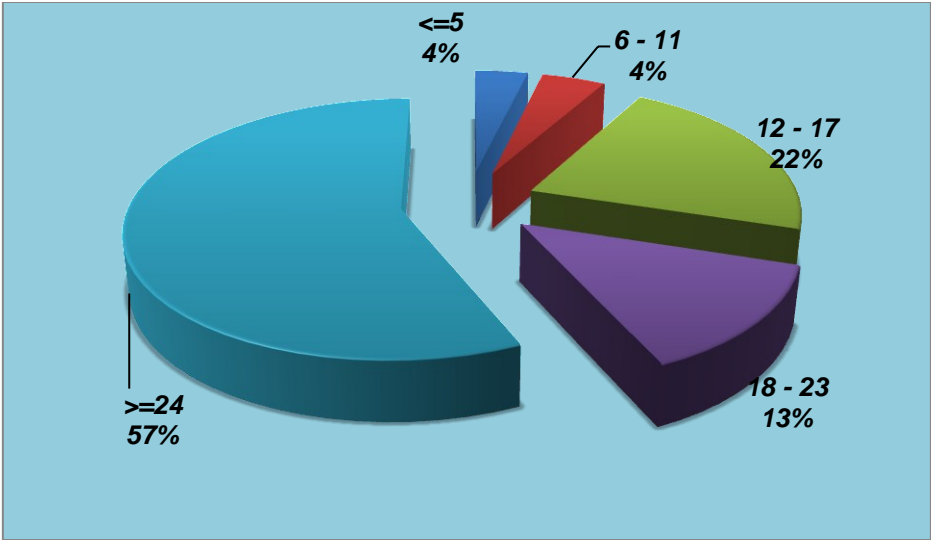


Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.12

Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2013

Lama menyusui balita di KSB pada tahun 2013 bervariasi antar kelompok umur. Secara kasar, semakin lama umurnya maka semakin lama pula rentang waktu disusui oleh ibunya. Untuk anak berumur dibawah 5 bulan rata-rata disusui selama 3,7 bulan. Sedangkan untuk anak berumur lebih dari 24 bulan rata-rata lama disusui oleh ibunya selama 56,7 bulan. Keadaan ini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.13

Persentase Anak Usia 2 - 4 Tahun yang Pernah Disusui menurut Lamanya Disusui Tahun 2013

Persentase wanita berumur 10 tahun keatas yang pernah kawin di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013 yang sedang menggunakan kontrasepsi sebanyak 43 persen. Sisanya adalah mereka yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi dan mereka yang tidak menggunakan lagi kotrasepsi dengan persentase masing-masing sebanyak 32 persen dan 25 persen. Sebagian besar (61 persen) wanita berumur 15 sampai dengan 49 tahun yang menikah di Kabupaten Sumbawa Barat sedang menggunakan kontrasepsi. Sisanya adalah mereka yang tidak menggunakan lagi kotrasepsi dan mereka yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi dengan persentase masing-masing sebanyak 21 persen dan 18 persen. Sebagian besar umur kawin pertama wanita berumur 10 tahun keatas yang pernah kawin di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 18 sampai dengan 24 tahun dengan persentase sebanyak 61 persen. Berada diurutan berikutnya adalah mereka yang umur kawin pertamanya 25 tahun keatas dengan 21 persen.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di KSP dilihat dari Fasilitas Wilayah atau infrastruktur, Iklim Investasi, Industri dan UMKM, Pariwisata, Pertanian dan Kelautan.

2.1.4.1 Aksesibilitas dan Transportasi

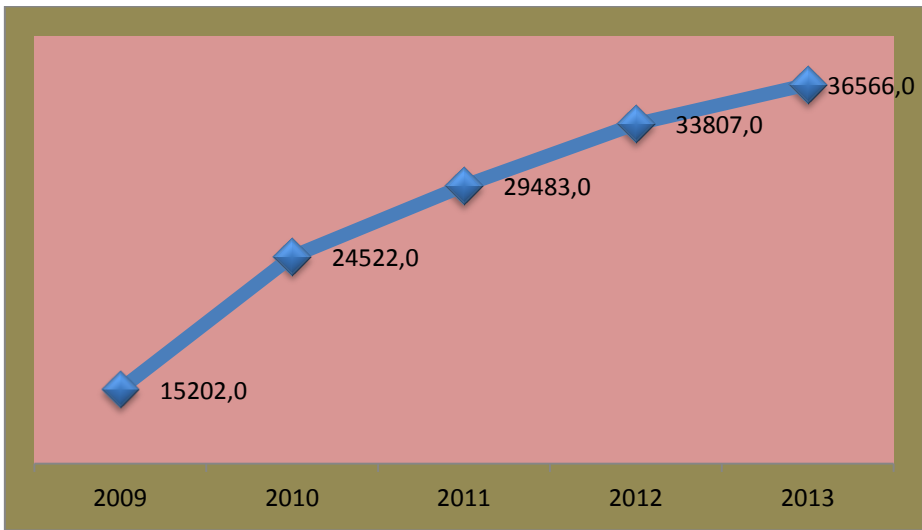
Transportasi merupakan sarana yang sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian. Hingga tahun 2013 panjang jalan yang ada di KSB mencapai 481,84 Km. Kondisi jalan sangat berpengaruh pada lancarnya perjalanan yang tentu saja akan berimbas pada sector perekonomian. Namun sayangnya, hanya 47 persen jalan di wilayah KSB yang beraspal. Dari seluruh jalan yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat hanya 35 persen yang memiliki kondisi baik. Tentu keadaan ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah, mengingat pentingnya jalan untuk aktivitas masyarakat KSB.

Tabel 2.9
Keadaan Jalan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 (Km)

Uraian	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
I. Jenis Permukaan			
1. Aspal	72,10	34,10	121,61
2. Kerikil	0	42,10	129,32
3. Tanah	0	0	82,61
II. Kondisi Jalan			
1. B a i k	52,4	30,25	85,60
2. Sedang	20,07	8,06	51,36
3. Rusak	0	21,05	86,62
4. Rusak Berat	0	16,84	109,96

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Dari sisi transportasi, jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang pesat dari tahun 2009 sampai 2013. Tahun 2009 jumlah kendaraan yang terdaftar pada Samsat KSB hanya berjumlah 15.202 buah, namun 5 tahun kemudian jumlah kendaraan melonjak tajam menjadi 36.566 kendaraan. Keadaan ini disajikan pada gambar berikut.



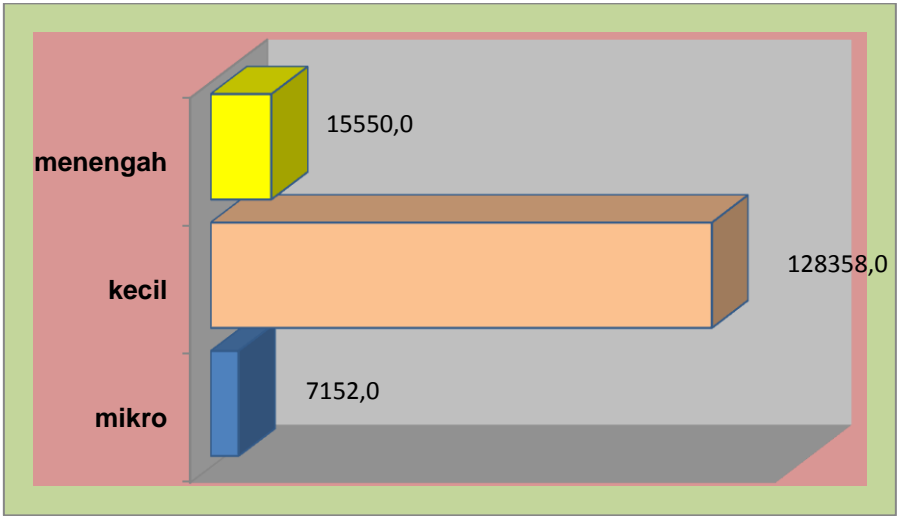
Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.14
Jumlah Kendaraan Bermotor di KSB Tahun 2009-2013(unit)

2.1.4.2. Investasi dan UMKM

Sebagian besar usaha di KSB berupa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM ini menyangkut kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang dalam mendirikan usaha memerlukan songkongan dana. Oleh karena itulah UMKM

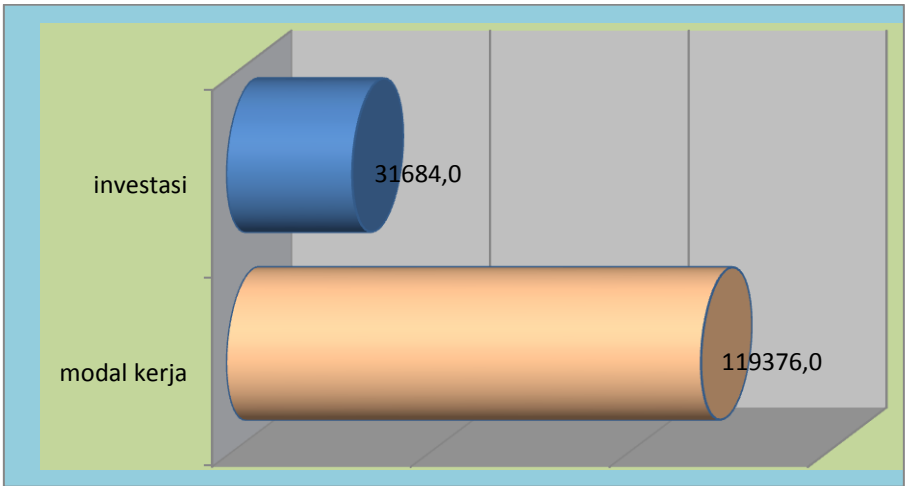
menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah. Bank Umum dan BPR ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan kredit pinjaman. Jumlah kredit pinjaman UMKM posisi Per 31 Desember tahun 2013 sebesar Rp. 151,06 milyar. Sebagian besar kredit UMKM diberikan ke usaha kecil, yakni sebesar Rp. 128,36 milyar.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.15
Posisi Kredit UMKM Menurut Skala Usaha di KSB Tahun 2013
per Nominal 31 Desember (Juta Rp)

Kredit yang diberikan oleh bank umum dan BPR kepada UMKM digunakan untuk investasi dan modal kerja. Hingga Per 31 Desember Tahun 2013 kredit pinjaman UMKM Rp. 119,38 milyar digunakan untuk modal kerja, sedangkan kredit pinjaman yang digunakan untuk investasi hanya sebesar Rp. 31,69 milyar.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.16
Posisi Kredit UMKM Menurut Jenis Penggunaan di KSB
Tahun 2013 Nominal 31 Desember (Juta Rp)

Kredit UMKM sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan, hotel dan restoran, yakni mencapai Rp. 139,2 milyar atau 93 persen dari seluruh kredit yang diberikan kepada UMKM. Meskipun 38 persen (Sakernas 2013, BPS) penduduk KSB bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, namun kredit yang dikucurkan ke sektor ini hanya Rp. 1,73 milyar atau 2 % dari jumlah kredit UMKM.

Tabel 2.10
Posisi Kredit UMKM Menurut Lapangan Usaha di KSB Tahun 2013
Nominal 31 Desember (Juta Rp)

Lapangan Usaha	Pinjaman
1. Pertanian Peternakan& Perikanan	1 733
2. Pertambangan Dan Penggalian	0
3. Industri Pengolahan	2 024
4. Listrik Gas Dan Air Bersih	0
5. Konstruksi	2 719
6. Perdagangan Hotel dan restoran	139 217
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	1 886
8. Keuangan Real Estate Dan Jasa Perusahaan	2 142
9. Jasa-jasa	1 338
Jumlah / Total	151 060

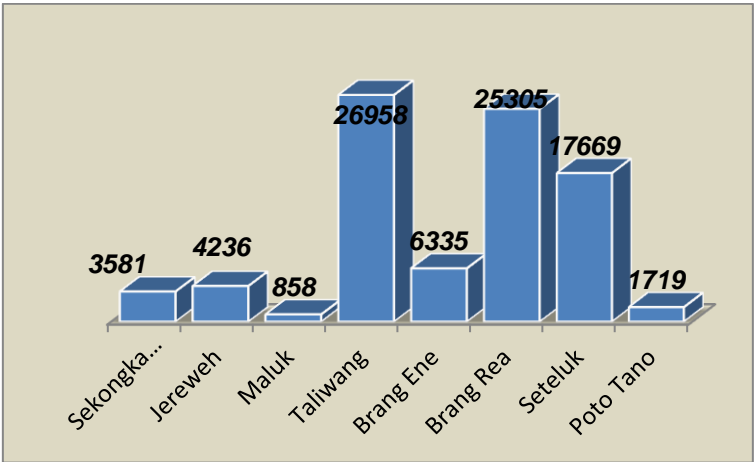
Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

2.1.4.3. Pertanian dan Perkebunan

Pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di KSB. Walaupun nilai tambah yang dihasilkan tidak sebesar sektor pertambangan, namun penyerapan tenaga kerja pada sektor ini tertinggi dibandingkan sektor lainnya (38,11 persen/Sakernas 2013, Badan Pusat Statistik). Dengan demikian kebijakan sektor pertanian berhubungan dengan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

1. Padi

Padi dan jagung merupakan produk andalan KSB. Tahun 2013, produksi padi mengalami penurunan 9,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi tentu sangat berpengaruh pada stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, mengingat komoditi lainnya dalam sub sektor tanaman bahan makanan belum menjadi andalan.Keadaan tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.17
Produksi Padi di KSB Tahun 2013 (Ton)

2. Jagung

Produksi jagung terus mengalami peningkatan, Tahun 2009 produksi jagung hanya berkisar 10.690 ton, meningkat tajam menjadi 30.882 ton pada tahun 2013.

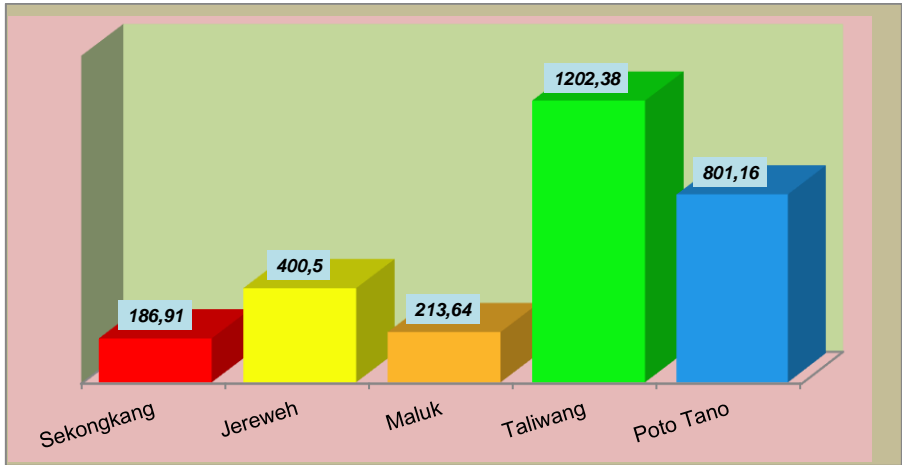
Tabel 2.11
Produksi Jagung di KSB Tahun 2012-2013 (ton)

Jenis Komuditas	2012	2013
Jagung	27.462	30.882

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

3. Perikanan

KSB sebagai daerah pesisir mempunyai potensi perikanan laut yang sangatlah besar. Pada tahun 2013 jumlah produksi hasil perikanan laut sebesar 2799,93 ton. Dari 8 wilayah kecamatan di KSB, 5 diantaranya berpotensi sebagai daerah penghasil perikanan. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari Kecamatan Taliwang (1202,38 ton) dan Kecamatan Maluk (801,16 ton).

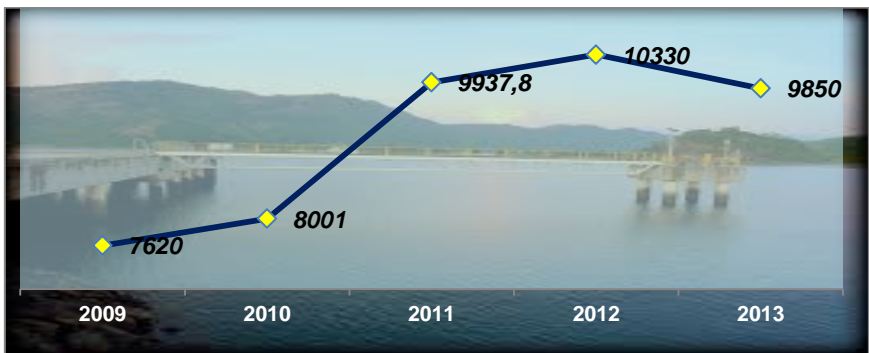


Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.18
Produksi Ikan Laut di KSB menurut *Landing Places*
Tahun 2013 (Ton)

4. Rumput Laut

Rumput laut sudah menjadi salah satu komoditi andalan di Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan menjadi salah satu sentra produksi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun tahun 2013 produksi rumput laut mengalami penurunan sebesar 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 9.850 ton. Penurunan ini dikarenakan budidaya petani di Labuhan Kertasari terserang hama.



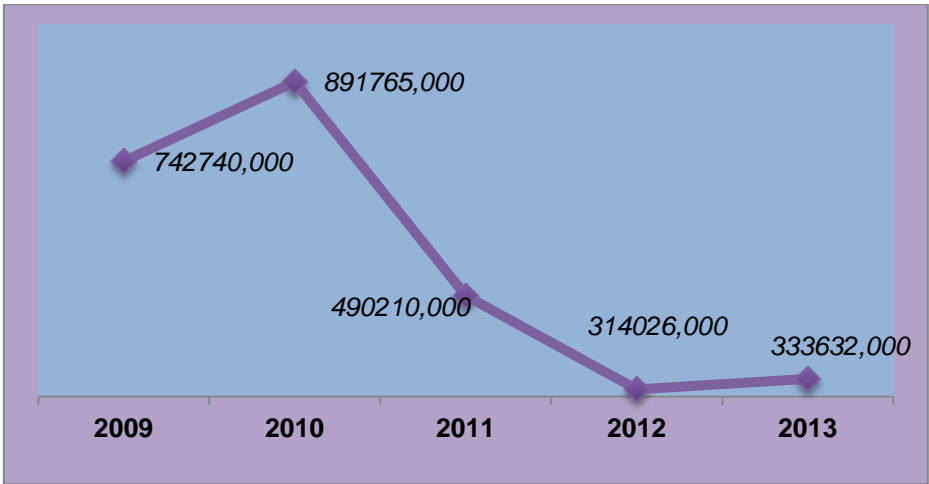
Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.19
Produksi Rumput Laut di KSB Tahun 2006-2011 (Ton)

2.1.4.4. Pertambangan dan Energi

Perekonomian KSB didominasi oleh sektor pertambangan non migas. Pendapatan yang disumbangkan oleh pertambangan non migas ini diatas 87 persen dari pendapatan bruto KSB. Sehingga naik turunnya nilai produksi hasil pertambangan akan sangat berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat.Hasil pertambangan dari PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) berupa

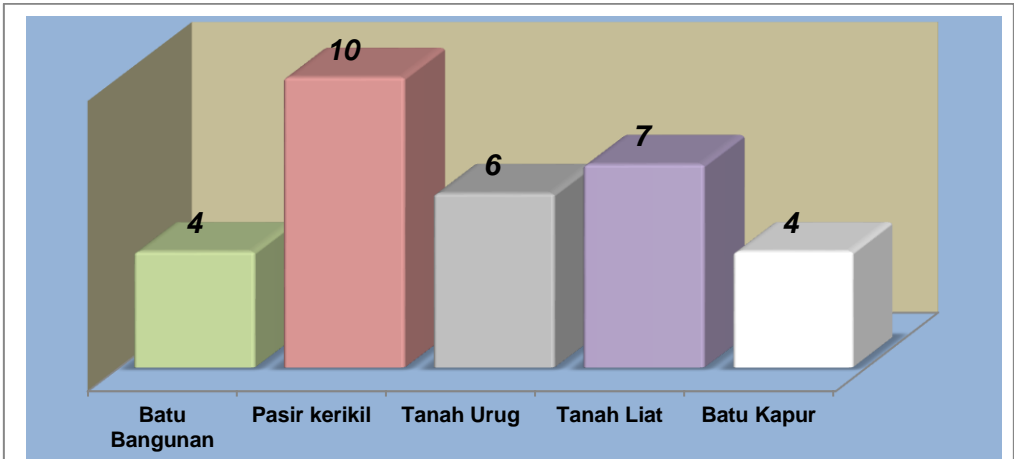
konsentrat, tahun 2013 jumlah konsentrat yang dihasilkan sebesar 333.632 ton basah.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.20
Produksi Konsentrat Tembaga Tahun 2009-2013 (Ton)

Topografi KSB yang berbukit menyebabkan potensi tinggi pada komoditas penggalian. Hingga tahun 2012, lokasi penggalian yang terlacak oleh dinas ESDM KSB mencapai 31 lokasi usaha, sebagian besar lokasi usaha menghasilkan komoditi pasir kerikil.



Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Gambar 2.21
Jumlah Lokasi Penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam penyelenggaraan urusan wajib tahun 2014 belanja pembangunan dialokasikan sebesar Rp 390.515.461.732, yang terdiri dari belanja urusan wajib Rp 359,498,027,106 dan belanja urusan pilihan sebesar Rp 31.017.434.626. Jumlah anggarandari setiap urusan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Urusan dan Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
KSB Tahun 2014

KODE	URUSAN/SKPD		ANGGARAN (Rp.)
1	Urusan Wajib		359,498,027,106
1.01	Pendidikan		40,871,752,072
1.01 .1.01.01		Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	40,871,752,072
1.02	Kesehatan		27,356,025,503
1.02 .1.02.01		Dinas Kesehatan	15,690,721,600
1.02 .1.02.02		Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat	11,665,303,903
1.03	Pekerjaan Umum		199,122,582,252
1.03 .1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum	199,122,582,252
1.04	Perumahan		10,798,000
1.04 .1.20.18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,798,000
1.05	Penataan Ruang		93,701,000
1.05 .1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum	0.00
1.05 .1.06.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93,701,000
1.06	Perencanaan Pembangunan		2,841,604,200
1.06 .1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum	14,600,000
1.06 .1.06.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,827,004,200
1.07	Perhubungan		12,159,831,576
1.07 .1.07.01		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12,159,831,576
1.08	Lingkungan Hidup		4,914,478,485
1.08 .1.08.01		Badan Lingkungan Hidup	4,914,478,485
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil		768,913,000
1.10 .1.10.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	768,913,000
1.11	Pemberdayaan Perempuan		770,834,030

1.11 .1.11.01		Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	770,834,030
1.12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	997,407,450
1.12 .1.11.01		Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	997,407,450
1.13		Sosial	369,145,000
1.13 .1.13.01		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	369,145,000
1.14		Tenaga Kerja	856,855,000
1.14 .1.13.01		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	856,855,000
1.15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,497,084,500
1.15 .2.07.01		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	2,497,084,500
1.16		Penanaman Modal	516,568,400
1.16 .1.16.01		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	516,568,400
1.17		Kebudayaan	2,140,000,000
1.17 .1.01.01		Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	2,140,000,000
1.19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,886,768,233
1.19 .1.19.01		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	466,620,000
1.19 .1.19.03		Satuan Polisi Pamong Praja	2,420,148,233
1.20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	55,082,671,180
1.20 .1.16.01		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	176,315,000
1.20 .1.20.01		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00
1.20 .1.20.02		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00
1.20 .1.20.03		Sekretariat Daerah	23,943,203,318
1.20 .1.20.04		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12,960,108,780
1.20 .1.20.05		Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,821,532,300
1.20 .1.20.07		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1,875,820,000
1.20 .1.20.08		Inspektorat Kabupaten	840,570,000
1.20 .1.20.10		Kantor Camat Taliwang	2,412,850,000
1.20 .1.20.11		Kantor Camat Seteluk	427,600,000

1.20 .1.20.12		Kantor Camat Jereweh	364,600,000
1.20 .1.20.13		Kantor Camat Brang Rea	379,600,000
1.20 .1.20.14		Kantor Camat Sekongkang	348,800,000
1.20 .1.20.15		Kantor Camat Poto Tano	408,400,000
1.20 .1.20.16		Kantor Camat Brang Ene	385,000,000
1.20 .1.20.17		Kantor Camat Maluk	358,000,000
1.20 .1.20.18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,846,411,782
1.20 .1.20.19		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	269,860,000
1.20 .1.20.20		Unit Layanan Pengadaan (ULP)	264,000,000
1.21	Ketahanan Pangan		2,299,795,825
1.21 .1.21.01		Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	2,299,795,825
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1,357,745,000
1.22 .1.22.01		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1,357,745,000
1.23	Statistik		30,208,000
1.23 .1.06.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30,208,000
1.24	Kearsipan		327,913,400
1.24 .1.24.01		Kantor Arsip dan Perpustakaan	327,913,400
1.25	Komunikasi dan Informatika		1,056,398,400
1.25 .1.07.01		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	269,944,000
1.25 .1.20.03		Sekretariat Daerah	786,454,400
1.26	Perpustakaan		168,946,600
1.26 .1.24.01		Kantor Arsip dan Perpustakaan	168,946,600
2	Urusan Pilihan		31,017,434,626
2.01	Pertanian		13,312,776,975
2.01 .2.01.01		Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian	11,590,872,175
2.01 .2.05.01		Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	1,721,904,800
2.02	Kehutanan		1,394,991,000
2.02 .2.01.01		Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian	1,394,991,000
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral		4,845,718,800
2.03 .2.03.01		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4,845,718,800
2.04	Pariwisata		1,928,790,000
2.04 .2.04.01		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,928,790,000

2.05	Kelautan dan Perikanan		6,069,589,200
2.05 .2.05.01		Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	6,069,589,200
2.06	Perdagangan		250,976,500
2.06 .2.07.01		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	250,976,500
2.07	Perindustrian		3,214,592,151
2.07 .2.07.01		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	3,214,592,151
JUMLAH			390,515,461,732

Sumber: DPPKD KSB, Tahun 2014.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh setiap urusan pemerintahan sebagaimana alokasi anggaran yang telah didistribusikan tersebut, dapat dilihat sebagaimana uraian berikut.

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan yang diselenggarakan pada **Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga** melalui 18 program utama. Alokasi anggaran belanja pembangunan tahun 2014 sebesar Rp 40,871,752,072. Keberhasilan pelayanan pendidikan ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka melanjutkan dan angka melek huruf.

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas penduduk. Semakin baik kualitas pendidikan di suatu daerah maka semakin baik pula kualitas penduduk di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan sarana dan prasarana serta regulasi yang mendukung perkembangan pendidikan ke arah yang lebih baik. Pada Tahun 2013 jumlah sekolah di KSB adalah 273 sekolah dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga tingkat SLTA. Dengan rincian 102 TK/RA, 104 SD/MI, 44 SLTP/MTS dan 23 SLTA/MA.

Semua capaian di bidang pendidikan tidak terlepas dari komitmen kuat Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang murah dan berkualitas. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung komitmen ini, antara lain Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dan Subsidi Pendidikan dari Tingkat TK/RA hingga Pendidikan Tinggi. Upaya mencerdaskan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan gerak pendidikan berbasis RT. Kegiatan ini telah banyak melahirkan kegiatan pendidikan di tingkat RT seperti pengembangan PAUD, pengentasan buta

aksara dilaksanakan bersama LSM dan lembaga pendidikan di tingkat RT (PKBM/TBM).

Pada awalnya program pendidikan gratis lebih ditujukan untuk memberikan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, dan hasilnya dalam kurun lima tahun tahap I sudah berhasil meningkatkan APK dan APM di semua jenjang pendidikan. Sementara itu, mulai tahun 2011, sasaran pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan. APK dan APM, serta jumlah lembaga pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.15. berikut.

Tabel 2.13
APK dan APM pada Berbagai Jenjang Pendidikan di KSB
Tahun 2011-2013 (Persen)

TAHUN	TK/RA		SD/MI/SDLB/ Paket A		SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B		SMA/MA/SMK/ SMALB/ Paket C	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
2011/2012	75,46	69,22	112,89	99,93	122,74	97,70	99,17	73,92
2012/2013	42,95	42,95	88,80	75,84	79,49	46,55	72,10	38,07
2013/2014								

Sumber : Dinas Dikbudpora KSB, 2014.

Data pada Tabel 2.13. menunjukkan bahwa APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sudah lebih dari 90,00 %, kecuali pada jenjang TK/RA yang kurang dari 80,00 %. Tingginya APK dan APM ini disebabkan adanya kebijakan stimulus pendidikan melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Pendidikan Gratis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manfaat pendidikan.

Angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan selalu mengalami penurunan, pada tahun 2012 angka putus sekolah sebanyak 39 orang dari semua jenjang pendidikan, menurun pada tahun 2013 menjadi 33 siswa. Hal ini menandakan bahwa sudah ada kesadaran bahwa pendidikan di KSB sudah mulai menunjukkan hasil positif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Tabel 2.14
Angka Putus Sekolah di KSB Tahun 2013

Lokasi Sekolah	SD	SMP	SMA	SMK
1. Sekongkang	0	0	0	0
2. Jereweh	2	1	0	0
3. Maluk	3	0	0	0
4. Taliwang	5	1	2	0
5. Brang Ene	0	0	0	0
6. Brang Rea	2	2	0	0
7. Seteluk	1	2	3	0
8. Poto Tano	3	2	4	0
Jumlah	16	8	9	0
2012	10	13	2	14

Sumber: Dinas Dikbudpora KSB, 2014.

Angka kelulusan sisiwa dalam menghadapi Ujian Nasional pada tahun 2013 mencapai rata-rata 99,00%.

Tabel 2.15
Angka Kelulusan Sekolah di KSB Tahun 2013

Tingkatan Sekolah	Peserta Ujian Nasional	Peserta yang lulus	Persentase
Sekolah Dasar	2 132	2 132	100
Sekolah Menengah Pertama	1 350	1 347	99,78
Sekolah Menengah Atas	824	823	99,88
Sekolah Menengah Kehuruan	496	495	99,8

Sumber: Dinas Dikbudpora KSB, 2014.

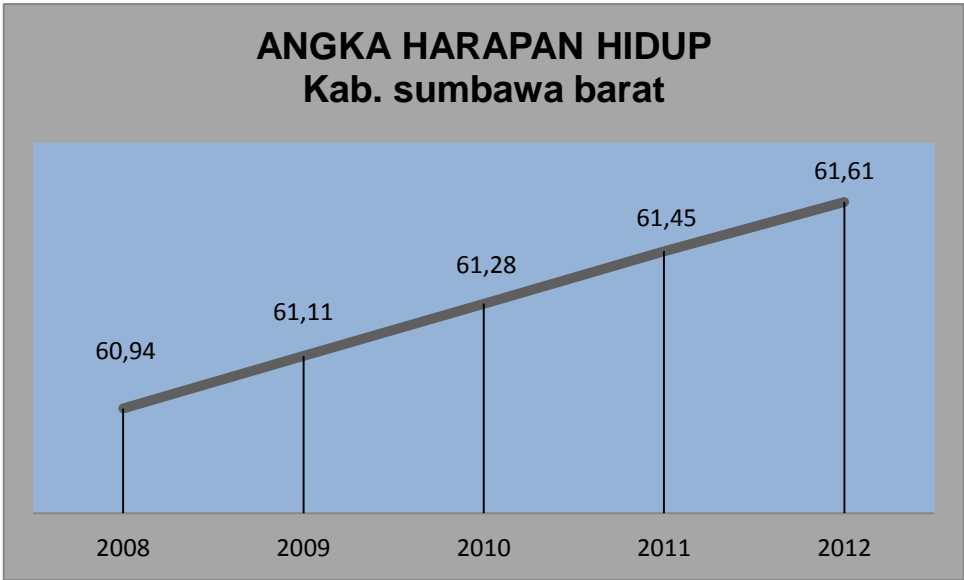
2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada **Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah** melalui 21 program utama. Alokasi anggaran belanja pembangunan tahun 2014 sebesar Rp 27,356,025,503. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator –indikator tersebut pada umumnya tercemin dalam kondisi morbiditas, mortalitas, dan status gizi. Disamping itu, derajat kesehatan masyarakat pada umumnya tidak hanya dipengaruhi oleh sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan, SDM dan

ketersediaan sarana dan prasarana, akan tetapi juga dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan keturunan.

a. Angka Harapan Hidup

IPM mencerminkan pelaksanaan pembangunan manusia dalam 3 dimensi yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan dan keterampilan serta kehidupan yang layak. Setiap dimensi di ukur dalam bentuk indikator, yang dibentuk ke dalam bentuk indeks harapan hidup (AHH), pendidikan yang terbagi menjadi Angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS) serta pendapatan (PPP).



Sumber :BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2014

Gambar 2.22.
Angka Harapan Hidup di KSB Tahun 2008-2014

Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia di KSB tercatat sebesar 67,85. jika dibandingkan dengan sembilan kabupaten kota lainnya di NTB, KSB menempati urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Kota Bima. Angka IPM KSB juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bila dilihat dari masing-masing komponen pembentuknya IPM KSB mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, Angka Harapan hidup meningkat dai 61,45 tahun pada 2011 menjadi 61,61 tahun pada 2012. Angka Melek huruf juga mengalami peningkatan dari 91.47 persen pada tahun 2011 menjadi 92,50 persen pada tahun 2012, demikian pula halnya dengan rata-rata lama sekolah dan pendapatan regional per kapita mengalami peningkatan dari 72.371.824,92 rupiah pada tahun 2012 dan 75.833.010,17 rupiah pada tahun

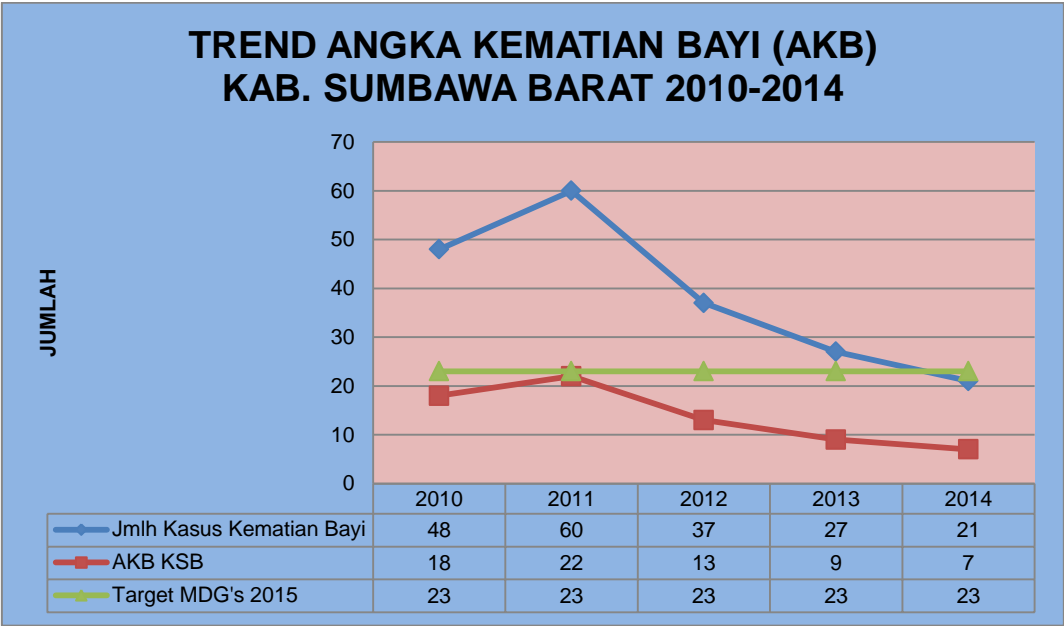
2013.Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat KSB baik dari dimensi kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Nilai IPM KSB yang mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2010 IPM KSB 66,47 sedangkan IPM NTB 65,20, pada tahun 2011 IPM KSB 67,08 sedangkan IPM NTB 66,23, dan pada tahun 2012 IPM KSB mencapai 67,85 sedangkan IPM NTB sebesar 66,89.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun yang sama.

Pada tahun 2014 tercatat 21 kematian bayi (17 dimasa neonatal usia 0-28 hari dan 4 di usia 29 hari-29 bulan). Jumlah kematian bayi di wilayah KSB terus menurun dari tahun sebelumnya yaitua dalah sebanyak 27 kasus tahun 2013 dan 37 kasus tahun 2012. Penurunan AKB di tahun 2014 ini salah satunya disebabkan karena semakin meningkatnya penanganan kasus neonatal risti oleh tenaga kesehatan.



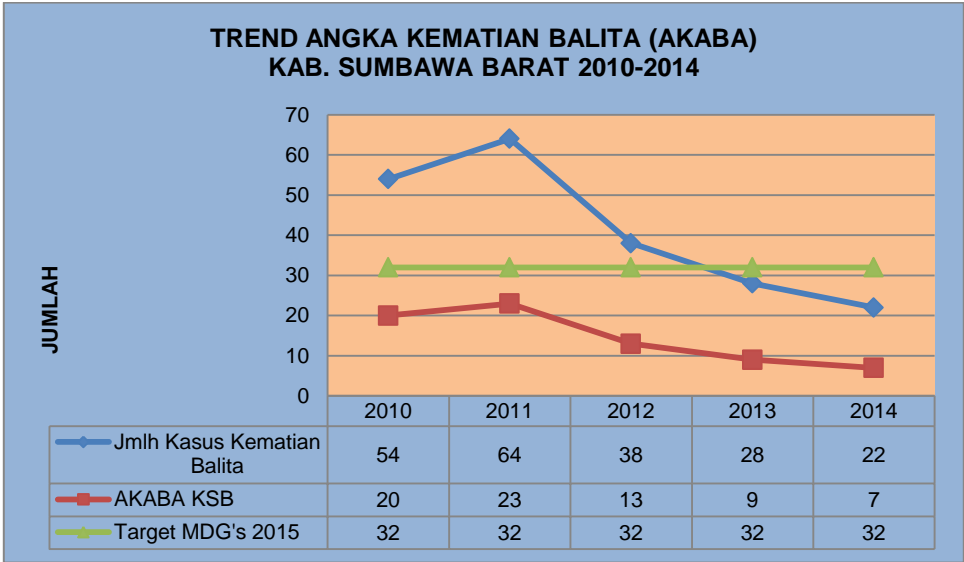
Sumber: Dinas Kesehatan KSB, 2014.

Gambar 2.23.
Trend Angka Kematian Bayi di KSB Tahun 2010-2014

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal mulai usia 1 tahun sampai kurang 5 tahun yang dinyatakan dalam 1.000

Kelahiran Hidup pada tahun yang sama. AKABA KSB tahun 2011 terjadi peningkatan dan 3 (tiga) tahun terakhir ini terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 22 kasus Tahun 2014, 28 Kasus Tahun 2013 dan 38 kasus tahun 2012. Trend Angka Kematian Balita (AKABA) di KSB Tahun 2010-2014, disajikan pada gambar grafik berikut ini.



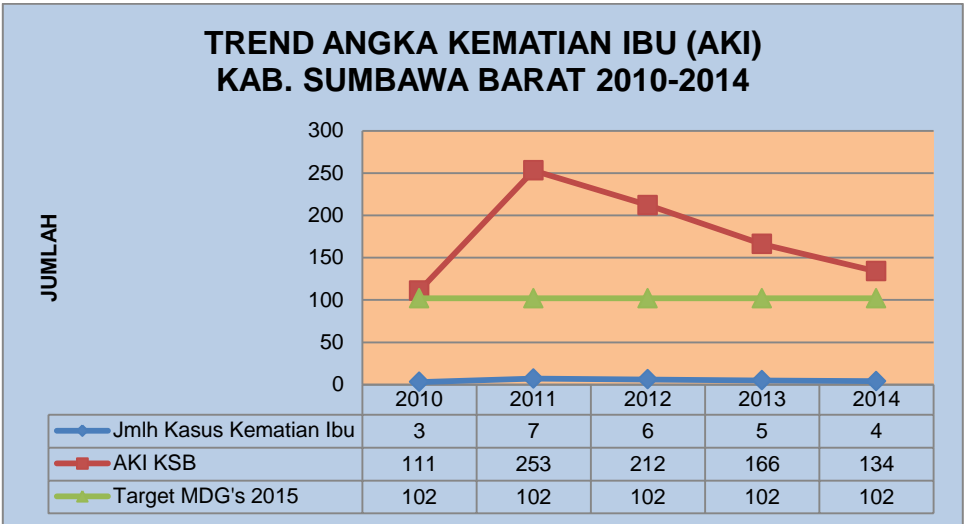
Sumber: Dinas Kesehatan KSB, 2014.

Gambar 2.24.
Grafik Trend Angka Kematian Balita (AKBA)
di KSB Tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa AKABA KSB masih berada jauh dibawah target MDG's 2015. Hal ini seiring dengan pengembangan program tumbuh kembang balita yang dilakukan oleh Dinas KSB.

d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka KematianIbu (AKI) adalah jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dalam 1 tahun yang sama dan dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini ditampilkan trend AKI KSB dari tahun 2010-2014 pada gambar grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan KSB, 2014.

Gambar 2.25.
Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di KSB Tahun 2010-2014

Gambar diatas menunjukkan trend AKI KSB tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 253/100.000 KH dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena mulai ada pengelolaan ibu hamil resiko tinggi dengan baik dan berkesinambungan serta penggunaan kohort sebagai bahan surveillence untuk membantu ibu hamil, bersalin dan nifas. Pada tahun 2013 tercatat ada 5 kasus kematian ibu (maternal) sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 4 kasus.

e. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Polio Myelitis AFP

Surveilens AFP adalah penemuan kasus semua anak berusia <15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya Flaccid (Layuh) terjadi secara akut atau mendadak bukan disebabkan oleh ruda paksa. Merupakan komitmen global WHO menuju eradikasi Polio dan diperkirakan tahun 2009 dunia bebas Polio. Untuk menuju bebas Polio setiap negara diharuskan menemukan kasus lumpuh layuh mendadak/AFP minimal 1 setiap 100.000 anak umur <15 tahun.Pada Tahun 2014 ditemukan3 kasus suspek AFP.

f. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit TB Paru

Berdasarkan hasil Survey Prevalens Nasional tahun 2004 bahwa perhitungan Case Detection Rate (CDR) untuk wilayah KTI termasuk KSB menggunakan *working estimate incidence rate* yaitu 210 per 100.000 penduduk untuk perkiraan penderita TBC BTA positif. Sumbawa Barat CDR baru mencapai 59% pada tahun 2012, tentu hal ini masih jauh dari target yang diharapkan sehingga perlu upaya penanganan yang serius. Untuk angka insidens, angka

prevalensi, angka kematian akibat TB, angka penemuan kasus baru, *success rate* TB.

g. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Ispa dan Pneumonia

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita dibandingkan non pneumonia balita yang dilayani dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain PHBS sudah berjalan dilingkungan keluarga dan semakin pahamnya masyarakat tentang penyakit. Tahun 2014 penemuan dan penanganan kasus pneumonia hanya mencapai 28,4% (427 kasus) dari 39,2% (551 kasus).

h. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit HIV/ AIDS

Upaya antisipasi dalam mencegah meningkatnya kasus HIV/AIDS adalah melalui sosialisasi dan kampanye anti AIDS, operasi ke lokasi dengan pihak-pihak lintas sektor terkait, kerjasama dengan lintas sektor terkait melalui pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi NTB, dan Kabupaten/ Kota, mengadakan survei dengan pengambilan sampel darah terhadap kelompok resiko tinggi untuk pemeriksaan HIV. Untuk Kabupaten Sumbawa Barat selama ini telah ditemukan kasus HIV/AIDS walaupun secara sembunyi-sembunyi pada tempat-tempat untuk menjajakan sex komersial. Di tahun 2014 tercatat 5 kasus baru HIV dan 7 kasus syphilis sementara di tahun 2013 tercatat 36 kasus HIV/AIDS.

i. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Diare

Hingga saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Pembangunan pada sektor kesehatan di KSB dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah diare, dimana penemuan kasus diare pada tahun 2010 sebanyak 7.339 kasus, tahun 2011 sebanyak 6.652 kasus, tahun 2012 sebanyak 5.412 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.007 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 4.586 kasus.

Adapun kebijakan pemberantasan penyakit diare dilaksanakan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait serta partisipasi aktif masyarakat secara luas antara lain organisasi profesi dan lembaga masyarakat di pusat maupun di daerah.

j. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Kusta

Penyakit Kusta merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas sampai ke masalah sosial, ekonomi dan budaya karena merupakan suatu kenyataan bahwa sebagian besar penderita kusta adalah dari golongan ekonomi lemah, yang selain membutuhkan penanganan secara medis juga memerlukan penanganan dari aspek sosial.

Program pemberantasan penyakit kusta di KSB masih mengalami masalah di beberapa puskesmas khususnya dalam hal penemuan penderita baru secara dini dimana penderita baru yang ditemukan sudah mengalami kecacatan. Hal ini dimungkinkan karena seorang penderita kusta lebih cenderung menutup diri dan tidak bergaul dengan masyarakat. Disamping itu juga disebabkan karena masih adanya opini masyarakat bahwa penyakit kusta, terutama yang disertai adanya kecacatan disebabkan oleh kutukan, perbuatan sihir atau penyakit keturunan sehingga penderita lebih cenderung berobat ke dukun daripada ke puskesmas.

Cakupan penderita kusta tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 3 kasus PB dan 21 kasus MB sedangkan pada tahun 2013 hanya 2 kasus PB dan 13 kasus MB.

k. Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah (DBD) merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Seiring dengan terjadinya perubahan iklim dari musim kemarau ke penghujan dimana curah hujan yang tidak menentu, hal ini menyebabkan tingkat perkembangan nyamuk menjadi pesat. Adanya genangan-genangan air di sembarang tempat merupakan media atau tempat perkembangbiakan nyamuk termasuk nyamuk *Aedes Aegypti*. Hal ini diperparah dengan perilaku masyarakat yang kurang mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat. Untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan yang pesat maka perlu dilakukan 3M Efektif, yaitu Menutup tempat-tempat penyimpanan air, Menguras bak-bak mandi dan tempat menyimpan air terbuka, Mengubur barang bekas yang dapat dijadikan tempat perindukan oleh nyamuk.

KSB dinyatakan Endemis karena 3 (tiga) tahun berturut-turut terdapat kasus DBD. Berdasarkan data jumlah kasus Demam Berdarah dan Demam Dengue di KSB mengalami fluktuasi dimana dimana tahun 2012 sebanyak 5 kasus

meningkat tahun 2013 menjadi 53 kasus kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 19 kasus, yang meninggal tidak ada.

I. Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Malaria

Jumlah penderita penyakit malaria dapat dilihat berdasarkan angka positif malaria Annual Parasite Incidence (API). Besarnya API pada tahun 2014 adalah 4.01 permil, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 4.41 permil. Akan tetapi angka ini jika dilihat secara absolut masih tergolong tinggi karena belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Malaria Tahun 2014 yaitu < 3 permil. Dengan angka tersebut Kabupaten Sumbawa Barat berada pada strata Medium Case Incidence, sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang intensif untuk menurunkan angka kesakitan malaria.

Annual Malaria Incidence (AMI) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 sebesar 33,4 permil, menurun dari Tahun 2013 sebesar 47,06 permil. Penurunan bukan menjadi suatu masalah selama tetap diikuti dengan pencapaian pemeriksaan sediaan darah 100%. Dengan angka tersebut Kabupaten Sumbawa Barat berada pada strata Medium Incidence Area.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui 12 program, dengan alokasi anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 199,122,582,252.

Prasarana perhubungan di KSB tahun 2013 berupa Jalan Negara 72,10 km dengan kondisi baik, Jalan Provinsi 76,20 km dengan kondisi sebagian besar beraspal baik. Sementara itu, Jalan Kabupaten 323,54 km dengan kondisi sebagian beraspal baik dan sebagian lainnya berkrekil dan tanah. Jumlah jembatan 95 buah dengan panjang 1.780 meter (BPS dan BAPPEDA KSB, 2014).

Jumlah prasarana irigasi di KSB tahun 2012 sebanyak 55 unit yang tersebar di semua kecamatan, terdiri atas: Bendung Teknis 18 unit dengan luas areal 9.576 Ha, dan Bendung Irigasi Desa 37 unit dengan luas areal 3.273 Ha. Saluran primer prasarana irigasi tersebut sepanjang 47.702 meter dan saluran sekundernya sepanjang 102.557 meter, sehingga luas baku sawah dan luas potensial sawah yang dapat diairi masing-masing sebanyak 8.652 hektar dan 6.439 hektar (Dinas Pekerjaan Umum KSB, 2013; BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2013).

Produksi Listrik PLN di KSB tahun 2013 sebesar 56.630.100 KWH, produksi sendiri 63.397 KWH, produksi jual 35.230.581 KWH dengan nilai jual Rp 27.039.406.140. Hampir semua desa/kelurahan di KSB (62 kelurahan/desa atau

95,38 %) tahun 2013 telah mempunyai jaringan listrik PLN, dimana pemanfaatannya masih didominasi oleh pelanggan dari kelompok rumah tangga (23.600 pelanggan) (P.T. PLN Wilayah XI Cabang Sumbawa dalam BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014).

4. Urusan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dengan melaksanakan 17 program utama, alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2.827.004.200. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 antara lain:

- a. Terlaksananya Musyawarah perencanaan pembangunan.
- b. Tersedianya Buku PDRB.
- c. Tersedianya Buku Sumbawa Barat Dalam Angka.
- d. Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka.
- e. Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Manusia.
- f. Tersedianya Buku Profil Sumbawa Barat.
- g. Penyusunan RKPD.
- h. Penyusunan KU dan PPAS APBD.
- i. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.
- j. Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

5. Perhubungan

Urusan Perhubungan yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika** dijabarkan melalui 12 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 4.914.478.485. Sarana perhubungan (kendaraan umum) yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat dan sekaligus beroperasi di KSB tahun 2013 cukup banyak dan lancar. Jumlah kendaraan umum tahun 2013 meliputi: Mikro bus 133 unit, bus biasa 19 unit, mini bus 830 unit, truk barang 291 unit, sepeda motor 35,462 unit dan gerobak/cidomo 384 unit (BPS KSB dan Bappeda KSB, 2014).

Pelabuhan laut/dermaga di KSB tahun 2014 sebanyak tiga buah, yaitu Pelabuhan Poto Tano, Pelabuhan Benete dan Pelabuhan Labuan Lalar, sedangkan pelabuhan udara hanya 1 buah di Kecamatan Sekongkang (sedang proses rehabilitasi). Prasarana perhubungan tersebut berperan penting dalam memperlancar arus kendaraan, barang dan jasa ke dan dari pulau lainnya.

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya di KSB tahun 2013 sebanyak 22 buah (hotel berbintang 1 buah dan non bintang 21 buah), yang dilengkapi dengan kamar tidur 367 kamar, tempat tidur 412 unit, serta restoran 28 buah dengan jumlah karyawan sekitar 292 orang (BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014).

6. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Badan Lingkungan Hidup** dijabarkan melalui 9 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 4.914.478.485. Kawasan hutan yang menempati porsi paling besar dari luas wilayah KSB tahun 2014 (sekitar 68,28 %), telah dilakukan pengawasan dan/atau pemeliharaan, yaitu mencapai sekitar 75.000 ha (59,40 % dari luas hutan), termasuk di dalamnya telah dilakukan rehabilitasi lahan hutan yang tidak produktif sekitar 500 hektar, sehingga fungsi lingkungan/lindung, ekonomi dan sosial hutan masih terjamin hingga tahun 2014.

7. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dijabarkan melalui 4 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 768.913.000. Penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di KSB tahun 2013 berupa penerbitan Akta Kelahiran sebanyak 3.896 anak, KTP sebanyak 96.886 orang. Pelayanan Perijinan yang sudah diterbitkan di KSB tahun 2013 sebanyak 407 unit seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 120 unit, Ijin Tempat Usaha (SITU/HO) 73 unit, Ijin Usaha Industri 2 unit, Ijin Usaha Jasa Konstruksi 112 unit, Rekomendasi Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 3 unit, Ijin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IUP JPB) 24 unit, Tanda Daftar Gudang (TDG) 31 unit, Ijin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (IPLLS) 2 unit, Ijin Usaha Operasi Anggkutan (IUA) 18 unit, Izin Usaha Angkutan (IUA) 19 Unit dan Izin Trayek Angkutan 3 Unit.

8. Urusan Sosial

Urusan Sosial yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dijabarkan melalui 8 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 369.145.000. Lembaga Sosial budaya yang terdapat di KSB tahun 2014 antara lain: Karang Taruna 33 organisasi, Pramuka 30 organisasi, RKB PKK 60 organisasi, Organisasi Politik 20 lembaga, organisasi masyarakat 76 lembaga, organisasi profesi 5 lembaga, dan LSM 40 lembaga, dan lainnya 6 organisasi (BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014).

9. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dijabarkan melalui 8 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 856.855.000. Jumlah penduduk KSB tahun 2013 sebanyak 121.167 jiwa, sedang jumlah tenaga kerja 80.590 jiwa (66,51 %), seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kerja di KSB Tahun 2013

No	Kompenen	2013	Persen dari Jumlah penddk (%)
1.	Angkatan Kerja:	55.641	46,91
a.	Bekerja	52.923	44,62
b.	Menganggur	2.718	2,34
2.	Bukan Angkatan Kerja:	24.949	21,03
a.	Sekolah	6.440	5,43
b.	Mengurus RT	14.079	11,87
c.	Lainnya	4.430	3,60
3.	Total Tenaga Kerja (1+2)	80.590	67,95
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,04	-

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari sejumlah angkatan kerja pada tahun 2013, masih terdapat pengangguran/pencari kerja sebanyak 2,29 % dari jumlah penduduk atau 3,37 % dari jumlah angkatan kerja, serta TPAK69,04 persen. Dilihat dari sisi lapangan pekerjaan, sebanyak 37,70 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya berkerja pada sektor ekonomi lainnya, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di KSB Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha	2013 (Orang)	Persen
1	Pertanian Dlm Arti Luas	19.952	37,70
2	Pertambangan	2.535	4,79
3	Perdagangan	8.494	16,05
4	Jasa	13.458	25,43
5	Lainnya	8.484	16,03
	Total AK yg Bekerja	52.923	100,00

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dijabarkan melalui 2 program utama.

Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 2.497.084.500.Pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah SIUP dan tenaga kerja pada usaha perdagangan relatif sedikit.Secara umum fasilitas perdagangan belum berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi masyarakat karena adanya keterbatasan sumberdaya, terutama manajemen dan permodalan usaha.

Tabel 2.18.
Keadaan Berbagai Aspek Koperasi di KSB Tahun 2013

No.	Aspek/Komponen	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Koperasi	Unit	465
2	Jumlah Anggota	Orang	38.528
3	Jumlah Modal Sendiri	Rp 000,-	22.550.569
4	Jumlah Modal Luar	Rp 000,-	18.863.858
5	Volume Usaha	Rp. 000,-	42.931.405
6	Jumlah Asset	Rp. 000,-	41.414.427
7	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 000,-	2.129.286

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

11. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Badan Penanaman Modal Pelayanan PerizinanTerpadu** dijabarkan melalui 6 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 516.568.400.Usha Penanaman Modal menunjukkan bahwa usaha pertambangan/penggalian yang cukup banyak di KSB telah menghasilkan produksi dan nilai produksi yang cukup tinggi, serta memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja atau penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak.

Tabel 2.19
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Produksi berbagai
Jenis Industri Kecil/Rumahtangga di KSB Tahun 2013

No.	Jenis Industri	Jlh Unit Usaha	Jlh Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp 000,-)	Nilai Produksi (Rp 000,-)
1	Industri makanan, minuman dan tembakau	155	346	3.649.315	2.428.480
2	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	43	61	1.047.960	266.582
3	Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	23	96	3.285.000	1.593.250
4	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	10	28	325.000	146.250

5	Industri pengolahan lainnya	277	702	6.124.050	5.755.447
	Total	508	1.233	14.431.325	10.190.009

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Data pada Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis industri kecil/rumahtangga yang banyak terdapat di KSB adalah: industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri pengolahan lainnya, sedangkan jenis industri lainnya masih relatif sedikit jumlahnya.

Hubungan kerjasama atau kemitraan usaha antar perusahaan yang ada di KSB telah terjalin, baik secara formal maupun nonformal. Nama-nama perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan usaha sampai dengan tahun 2013, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Nama-nama Perusahaan yang Berinvestasi di KSB s.d. Tahun 2013

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi	Nilai Investasi
1	PT. Newmont Nusa Tenggara	Tambang Emas	Batu hijau	US \$ 243.474.910
2	PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama	Tambang Emas	Taliwang	-
3	PT. Indotan Sumbawa Barat	Tambang Emas	Jereweh	US \$ 42.572.366
4	PT. Husny Lee mining	Tambang Mangaan	Jereweh	Rp 154.031.000.000
5	CV. Bumi Nusantara	Tambang Mangaan	Sekongkang	US \$ 6.000.000
6	PT. Pulau Sumbawa Agro	Pengembangan Tanaman Sisal	Sekongkang	-
7	PT. Bumi Rizki Sejati	Tambang Mangaan	KSB	US \$ 2.400.000
8	PT. Aoture Pealt Culture	Budidaya Mutiara	Taliwang	US \$ 1.500.000
9	PT. Polama Agung	Budidaya Mutiara	Taliwang	US \$ 1.007.000
10	PT. Bumi Pasir Mandiri	Tambang Kapur	Taliwang	-
11	PT. Bumi Harapan Jaya	Tambak Udang	Poto Tano	-
12	PT Nasional Oriental Permai (NOP)	Pariwisata Bahari P. Paserang	Kecamatan Poto Tano	-

Sumber: BAPPEDA KSB, 2005-2013.

12. **Urusan Ketahanan Pangan**

Urusan Ketahanan Pangan yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan** dijabarkan melalui 6 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 2.299.795.825. Perkembangan situasi pangan KSB tahun 2010-2013 mengalami surplus, seperti disajikan pada table berikut.

Tabel 2.21
Situasi Pangan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010-2013

No.	Tahun	Ketersediaan Beras (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Sisa/ Stock (Ton)	Kondisi
1.	2010	39.188,03	14.459,00	24.659,03	Surplus
2.	2011	54.186,00	14.688,52	39.497,48	Surplus
3.	2012	103.715,00	12.065,00	91.650,00	Surplus

Sumber: BKP5K Kabupaten Sumbawa Barat, 2014.

Sejak berdirinya KSB hingga saat ini tidak pernah terjadi rawan pangan. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah KSB telah melihat kebutuhan masyarakat dalam semua aspek kehidupan terutama aspek ketahanan pangannya. Jumlah lumbung pangan tahun 2013 sebanyak 56 buah dan penyimpanan bawah kolong rumah panggung (*ciri khas rumah penduduk pulau Sumbawa*) berjumlah 6.041 buah.

13. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** dijabarkan melalui 10 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 1.357.745.000.

Pelayanan dan pembinaan kecamatan ke kelurahan/desa pada delapan kecamatan di KSB tahun 2013 pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan aparatur kecamatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini diakui, bahwa sampai saat ini jumlah aparatur pemerintah kecamatan pada delapan kecamatan di KSB dengan kualifikasi dan kompetensi masih sangat terbatas.

14. **Urusan Statistik**

Urusan Statistik yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dijabarkan melalui 1 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 30.208.000. Capaian dan indikator dari urusan statistik

adalah tersedianya Buku Sumbawa Barat dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka, Profil Sumbawa Barat, PDRB dan IPM.

15. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan** dijabarkan melalui 11 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 13.312.776.975.

Dalam RTRW KSB Tahun 2011-2031 dan RPJMD KSB Tahun 2011-2015 telah ditetapkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Agroindustri Poto Tano sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi NTB (KSP), serta sekaligus sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Sumbawa Barat (KSK). Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan melalui kelembagaan *Regional Management Pulau Sumbawa* (RMPS), dengan inti usahanya (*core business*) agroindustri Rumah Potong Hewan (RPH) Internasional, sedang usaha pendukung(*supporting business*) berupa agroindustri perikanan dan pertanian pangan, seperti Agroindustri Rumput Laut, Agroindustri Jagung, dan lain-lainnya.

Selain KSP Agroindustri Poto Tano, juga terdapat dua Kawasan Strategis Provinsi NTB di KSB tahun 2013, yaitu Kawasan Puncak Selalu-Legini dengan arahan fungsi utamanya untuk konservasi sumberdaya alam lahan dan air, serta Kawasan Lingkar Tambang (Kecamatan Jereweh-Maluk-Sekongkang) dengan arahan fungsi utamanya untuk pengembangan pariwisata bahari dan agrowisata.

Khusus untuk Kawasan Strategis KSB, telah pula ditetapkan lima KSP Agropolitan Kemutar Telu (KSP-AKT) melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 77a tahun 2008, dan pada tahun 2013 telah tersedia *Master Plan/Action Plan* Pengembangannya meliputi: (1) KSP-AKT Kecamatan Seteluk dengan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan; (2) KSP-AKT Kecamatan Brang Rea dengan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan darat; (3) KSP-AKT Kecamatan Taliwang dengan komoditas unggulan perikanan laut dan agro-kota; (4) KSP-AKT Kecamatan Brang Ene dengan komoditas unggulan perikanan darat dan pertanian tanaman pangan; serta (5) KSP-AKT Kecamatan Jereweh dengan komoditas unggulan agrowisata, perikanan laut dan hortikultura.

Penggunaan lahan sawah tahun 2013 semakin intensif. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan lahan sawah yang beririgasi teknis MT 2013 seluas 8.279 hektar dibandingkan MT 2012 hanya seluas 8.267 hektar, atau meningkat 0,14

%.Peningkatan tersebut disebabkan adanya pencetakan sawah baru dan penggunaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan obat-obatan) yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya.

Ekstensifikasi pengusahaan lahan kering untuk budidaya pertanian dan peternakan pada tahun 2013 terjadi peningkatan dengan luas 21.428 ha dibandingkan tahun 2012 hanya 17.143ha, atau meningkat 25,00 %.Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan melalui pendekatan Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan sistem agribisnis, yaitu melalui pengusahaan lahan kering untuk budidaya pertanian dan peternakan.

Komoditas Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di lahan sawah berupa tanaman pangan seperti: padi, palawija dan sayur-sayuran, dengan frekuensi tanam 2-3 kali setahun. Komoditas pertanian tanaman pangan yang umumnya diusahakan di lahan kering antara lain: jagung dan kacang hijau. Luas panen dan jumlah produksi padi dan jagung cukup banyak karena sebagai komoditas utama, sedang luas panen dan jumlah produksi komoditas pertanian tanaman pangan lainnya relatif sedikit karena merupakan komoditas penunjang.

Jumlah Kelompok Tani di KSB tahun 2013 sebanyak 1.020 kelompok, terdiri atas: KT tanaman pangan 545 kelompok dengan jumlah anggota 15.348 orang, KT perkebunan 58 kelompok dengan anggota 1.309 orang, KT Peternakan 272 kelompok dengan anggota 3.286 orang, KT Kehutanan 46 kelompok dengan anggota 1.298 orang, dan KT Perikanan 99 kelompok dengan anggota 1.226 orang. Jumlah PPL sebanyak 50 orang, terdiri atas: Penyuluh Pertanian 34 orang, Penyuluh Perikanan 5 orang, Penyuluh Kehutanan 11 orang.

Tabel 2.22
Luas Panen dan Produksi berbagai Jenis Tanaman Pangan Tahun 2013

No.	Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	18.027	85.985
2	Padi Ladang	166	675
3	Jagung	5.486	30.882
4	Kedele	1.056	1.002
5	Kacang Hijau	536	606
6	Kacang Tanah	265	300
7	Ubi Kayu	37	480
8	Ubi Jalar	22	259

Sumber: Dinas HUTBUNTAN KSBdalam BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Dari tabel diatas diketahui bahwa luas panen dan jumlah produksi padi dan jagungcukup banyak seiring dengan banyaknya jumlah petani yang mengusahakannya. Sementara itu, luas panen dan jumlah produksi komoditas

pertanian tanaman pangan lainnya (kedele, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar) relatif sedikit karena merupakan komoditas penunjang yang diusahakan petani.

16. Urusan Kehutanan

Urusan Pertanian yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan** dijabarkan melalui 3 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 1.394.991.000.

Kawasan hutan yang menempati porsi paling besar dari luas wilayah KSB tahun 2013 (sekitar 68,28 %), telah dilakukan pengawasan dan/atau pemeliharaan, yaitu mencapai sekitar 75.000 ha (59,40 % dari luas hutan), termasuk di dalamnya telah dilakukan rehabilitasi lahan hutan yang tidak produktif sekitar 500 hektar, sehingga fungsi lingkungan/lindung, ekonomi dan sosial hutan masih terjamin hingga tahun 2013.

Komoditas Perkebunan yang banyak diusahakan di KSB tahun 2013 ada tiga jenis yaitu: kelapa, jembu mente dan kopi, sehingga ketiganya merupakan komoditas utama, sedangkan komoditas perkebunan lainnya sebagai komoditas penunjang. Salah satu jenis komoditas perkebunan yang berkembang dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) adalah Tanaman Sisal (*Agave sp*), dengan kegunaannya untuk bahan baku industri karpet. Luas Tanaman Sisal tahun 2013 sebagai berikut: Perusahaan Inti (PT. Pulau Sumbawa Agro) sekitar 150 hektar sebagai lokasi penghasil bibit Sisal, Petani Plasma (tiga desa di Kecamatan Sekongkang) sekitar 400 hektar sebagai lokasi pertanaman Sisal.

Luas panen dan produksi berbagai komoditas perkebunan di KSB tahun 2013 disajikan pada Tabel dibawah ini, diketahui bahwa ada tiga jenis komoditas utama perkebunan yaitu: kelapa, jambu mentedan kopi. Sementara itu, berbagai jenis komoditas perkebunan lainnya sebagai komoditas penunjang.

Tabel 2.23
Luas Tanaman dan Produksi berbagai KomoditasPerkebunan
di KSB Tahun 2013

No	Jenis Komoditas	Tahun 2013	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	1.212	1.116,59
2	Kopi	260	154,30
3	Kapuk	126	44,99
4	Jambu Mete	1.152	227,18
5	Kakao	166	1,74
6	Pinang	35	8,57
7	Asam	135	98,70
8	Jarak Pagar	218	29,08
9	Lada	24	3,05
10	Aren	148	97,6
11	Asam	135	98,70

Sumber: Dinas HUTBUNTAN KSBdalam BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

17. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Energi Sumber Daya Mineral** dijabarkan melalui 10 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 4.845.718.800.

Tabel 2.24
Kondisi Sektor Pertambangan/Penggalan di KSB Tahun 2013

No.	Indikator	Satuan	2013
1.	Jumlah unit usaha	unit	5
2.	Jumlah tenaga kerja	orang	345
3.	Jumlah investasi	Rp. Milyar	31.666

Sumber: Dinas ESDM KSBdalam BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa usaha pertambangan/penggalan yang cukup banyak di KSB telah menghasilkan produksi dan nilai produksi yang cukup tinggi, serta memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja atau penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak.

Tabel 2.25
Jumlah SIUP, TDP, Tenaga Kerja dan Investasi Perdagangan
di KSB Tahun 2012

No.	Komponen	Satuan	Jumlah
1	SIUP	Unit	807
2	TDP	Unit	801
3	Tenaga Kerja	Orang	1.549
4	Investasi	(Rp. 000)	212.991.045

Sumber: Dinas PerindagKop UMKM KSB, 2013.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah SIUP dan tenaga kerja pada usaha perdagangan relatif sedikit. Secara umum fasilitas perdagangan belum berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi masyarakat karena adanya keterbatasan sumberdaya, terutama manajemen dan permodalan usaha.

18. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dijabarkan melalui 14 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 1.928.790.000.

Lokasi obyek pariwisata alam, baik berupa pantai di sepanjang pesisir, perairan darat (seperti: Lebo Taliwang) maupun pegunungan, telah ditata tahun 2013 untuk menjadi obyek wisata yang komersial, menyenangkan dan halal. Lokasi obyek Wisata Alam yang potensial di KSB sebanyak 32 lokasi, terdiri atas 13 lokasi obyek wisata pantai dan 19 lokasi obyek wisata alam darat dan air. Lokasi obyek wisata pantai yang telah berkembang saat ini adalah: Pantai Jelenga-Jereweh, Pantai Maluk, Pantai Sekongkang, dan Pantai Balat-Taliwang (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSB, 2014).

Tahun 2013 telah dilakukan perencanaan dan penetapan zonasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan KSB, dilakukan untuk mendukung percepatan pengembangan pariwisata alam. Tahun 2013 telah disusun *Master Plan* Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Konservasi Ekosistemnya, termasuk Gili Balu di Kecamatan Poto Tano. Pulau-pulau kecil KSB berjumlah 16 pulau dengan luas sekitar 1.016,83 ha. **Pulau Paserang** sebagai salah satu dari pulau-pulau kecil, pada tahun 2013 ini telah disepakati Kerjasama Pemanfaatannya untuk Pembangunan Industri Pariwisata Bahari KSB, antara Pemerintah KSB dengan PT. Nusantara Oriental Permai (PT. NOP), sedangkan 7 pulau kecil lainnya di Gili Balu telah disepakati kerjasama pengelolaannya antara Pemerintah KSB dengan PT. Eco Solution Lombok (PT. ESL).

19. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan** dijabarkan melalui 9 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 6.069.589.200.

Pengusahaan Ternak di KSB tahun 2013 sebagian besar kurang intensif dengan skala usaha yang kecil, sehingga perkembangannya relatif lambat. Padang rumput untuk pengembalaan ternak (terutama sapi, kerbau dan kuda) cukup tersedia (seluas 3.061 hektar) dengan jumlah lokasi pengembalaan ("lar") 13 unit yang

mampu menampung sekitar 51.000 ekor ternak besar. Jumlah populasi ternak seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Populasi berbagai Jenis Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di KSB Tahun 2013

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi	55.827	6	Ayam Buras	69.125
2	Kerbau	12.479	7	Ayam Ras	500
3	Kuda	5.783	8	Itik	9.408
4	Kambing	13.180	9	Entok	5.088
5	Domba	1.714	10	Merpati	385

Sumber: Dinas KPP KSBdalam BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Keterangan: Ternak Besar meliputi: Sapi, Kerbau dan Kuda.
Ternak Kecil meliputi: Kambing dan Domba.

Data pada Tabel menunjukkan bahwa jumlah semua jenis ternak besar, ternak kecil dan unggas cukup banyak. Hal ini didukung kondisi alam KSB berupa cukup tersediannya lahan kering, terutama padang penggembalaan/rumput tempat pemeliharaan ternak besar dan ternak kecil.

Operasional kegiatan perikanan laut oleh nelayan di KSB dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis prasarana dan sarana tangkap.Prasarana dan sarana tangkap yang umumdigunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan tahun 2013 sebagai berikut: jukung dan perahu sampan 193 unit, perahu motor tempel 14 unit, kapal motor 757 unit, payang 29 unit, jaring 1.006 unit, pancing 1.005 unit.Jumlah, kualitas dan kapasitas prasarana tangkap tersebut masih terbatas, akibatnya jangkauan operasi penangkapan (jarak tempuh), terutama bila gelombang besar hanya terbatas sekitar 2-4 km dari pantai (Dinas Kelautan Pertanian dan Peternakan KSB, 2014).

Potensi areal perikanan KSB tahun 2013 seluas 4.012,70 Ha meliputi: Budidaya Laut 1749 Ha, Perairan Umum 468 Ha, Tambak 946 Ha dan Kolam 849,7 Ha. Potensi produksi perikanan di KSB tahun 2013 sebanyak 57.987,51 ton meliputi: perikanan laut 13.750 ton, rumput laut 15.962 ton, tambak 5.085 ton, dan ikan air tawar 2827,51 ton. Sementara itu jumlah produksi beberapa jenis ikan yang utama meliputi: lemuru 349,5 ton, kembung 307,9 ton, tembang 292,6 ton, selar 179,8 ton, dan layang 135,2 ton.

Potensi lahan pertambakan di wilayah pesisir tahun 2013 seluas 3.136 ha, baru dapat dimanfaatkan untuk pembukaan tambak dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya seluas 652,50 ha (20,81 %). Areal tambak sebagian besar (78,93 %) terdapat di UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano, tetapi areal tersebut

selama sebelas terakhir tidak produktif. Berkaitan dengan usaha tambak udang Poto Tano, Pihak Perusahaan Pengelola (PT. Bumi Harapan Jaya).

Tabel 2.27
Potensi Areal, Pemanfaatan dan Produksi Budidaya Laut
di KSB Tahun 2013

No.	Jenis Budidaya	Potensi Areal (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Mutiara	550	370,50	0,15
2	Kerapu	15	1,30	8,00
3	Lobster	17	1,00	1,90
4	Rumput Laut	1.550	460	9.937,88
5	Teripang	25	0,50	0,01
	TOTAL	2.132	832,80	-

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Potensi areal perikanan yang sangat besar pada Tabel di atas, baru dapat direalisasikan pemanfatannya sekitar 39,06 % dengan jumlah produksi yang belum optimal karena terbatasnya kemampuan sumberdaya nelayan, terutama sarana prasarana tangkap.

20. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM** dijabarkan melalui 1 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 250.976.500.

Perusahaan yang berbadan hukum pada tahun 2013 di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar terdiri dari atas nama perorangan, dengan jumlah mencapai 540 perusahaan. Terbanyak kedua setelah perusahaan perorangan adalah perusahaan dengan bentuk CV/Firma dengan jumlah 125 perusahaan. Dua jenis perusahaan terbanyak berikutnya adalah perusahaan yang berbentuk PT dan Koperasi masing-masing sebesar 54 perusahaan dan 13 perusahaan.

Untuk semua kategori (besar, menengah, dan kecil), jumlah pedagang terbanyak terdapat di Kecamatan Taliwang dengan 1.017 pedagang yang terdiri atas 4 pedagang besar, 198 pedagang menengah, dan 815 pedagang kecil. Kecamatan dengan jumlah pedagang paling sedikit adalah Kecamatan Sekongkang dengan 121 pedagang yang terdiri dari 5 pedagang menengah dan 116 pedagang kecil.

Berbeda dengan kategori pedagang menengah dan kecil yang terdapat diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk kategori pedagang besar hanya terdapat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Taliwang (4 pedagang) dan Kecamatan Seteluk (1 pedagang).

21. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian yang kegiatannya diselenggarakan oleh **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM** dijabarkan melalui 8 program utama. Alaksi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 3.214.592.151.

Peran sektor industri pengolahan bagi perekonomian di KSB tidak terlalu besar ditinjau dari share PDRB yang dihasilkan. Tahun 2013 sektor industri pengolahan hanya menyumbang 0,27 persen pada PDRB KSB. Walaupun kecil, perkembangan industri pengolahan di KSB terus mengalami peningkatan.

Jumlah perusahaan di KSB pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 508 perusahaan. Begitu pula dengan tenaga kerja yang bergerak di bidang industri pengolahan naik dari 1.219 pekerja menjadi 1.233 pekerja. Dilihat dari sisi investasi, tahun 2013 jumlah investasi yang dimiliki oleh seluruh perusahaan di KSB mencapai lebih dari Rp. 14,4 milyar. Jika dilihat dari sisi produksi seluruh perusahaan, tahun 2013 mampu naik hingga lebih dari 31 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.28
Rekapitulasi Industri KSB Tahun 2012- 2013

Komponen	2012	2013
Perusahaan (unit)	329	508
Tenaga Kerja (orang)	1 219	1 233
Investasi (juta Rp.)	11 856	14431
Produksi (juta Rp.)	7 780	10 190

Sumber: Badan Pusat Statistik KSB, 2014.

Dilihat dari kode jenis industri Pengolahan perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat, tahun 2013 industri pengolahan lainnya mencapai 277 perusahaan dengan 702 pekerja. Sedangkan jumlah industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 155 perusahaan dengan 346 pekerja.

Tabel 2.29
Jumlah Industri Pengolahan di KSB Tahun 2013

Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Industri makanan, minuman, dan tembakau	155	346
Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	43	61
Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan	23	96
Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastic	0	0
Industri logam dasar	0	0
Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	10	28
Industri pengolahan lainnya	277	702
Jumlah	508	1.233

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas PERINDAGKOP & UMKM KSB, 2014.

2.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

- a. Masih ditemukannya putus sekolah pada pendidikan dasar, masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah pada pendidikan dasar dan masih ditemukannya guru yang belum memiliki ketrampilan dalam proses belajar dan mengajar
- b. Masih terdapatnya Angka Putus Sekolah (*Droup Out*) pada pendidikan menengah Atas, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan kependidikan lebih tinggi, kurang sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah.
- c. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non forman dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah

2. Kesehatan

- a. Masih terdapatnya angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh pemahaman atas kesehatan masih kurang. Masih ditemukannya persalinan tidak dengan tenaga profesional yang memiliki kompetensi, kurangnya sarana prasarana puskesmas.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, masih ditemukannya AFP pada penduduk usia dibawah 15 tahun.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan lingkungan sehat.
- d. Kurangnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat.

3. Pekerjaan Umum

- a. Belum optimalnya perbaikan jalan dan jembatan. Masih ditemukan persentase jalan rusak.
- b. Belum seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan akses air bersih.
- c. Belum optimalnya sistem drainase yang menyebabkan di beberapa wilayah terjadi genangan dan banjir pada saat curah hujan cukup tinggi.
- d. Belum optimalnya sistem jaringan irigasi.

4. Perumahan

- a. Terdapatnya rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Tidak maksimalnya ketersediaan rumah oleh pemerintah Kabupaten.

5. Penataan Ruang

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan atas Peraturan Daerah tentang RTRW di Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi antar dokumen perencanaan.
- b. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanaan pembangunan ditingkat desa oleh kecamatan melalui evaluasi.

7. Perhubungan

- a. Masih dirasa kurang penyediaan prasarana lalu lintas.
- b. Belum maksimalnya pembangunan sarana prasarana terutama sarana transportasi laut dan udara.

8. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat terutama yang disebabkan oleh PETI di wilayah Taliwang, Brang Ene dan Brang Rea.

9. Pertanian

- a. Masih terdapatnya tanah yang belum bersertifikat dimasyarakat.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan baik KTP, akte kelahiran dan akte Kematian serta akte perkawinan masih kurang, hal ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mempunyai E-KTP.

11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Kurang optimalnya kelembagaan PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom.
- b. Masih kurangnya partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang.
- c. Masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan KS I (termasuk keluarga miskin) terutama di wilayah perdesaan.

13. Sosial

- a. Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini dikarenakan peran PSKS dan swasta belum optimal dalam penanganan dan pembinaan PMKS.
- b. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi PMKS.

14. Ketenagakerjaan

- a. Masih tingginya jumlah penganggur (pencari kerja).
- b. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Masih terdapatnya koperasi tidak aktif dimasyarakat.
- b. Belum optimalnya penciptaan wirausaha baru.
- c. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi terutama masalah keahlian, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen.
- d. Belum optimalnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat.

16. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum berjalan.

17. Kebudayaan

- a. Masih pengembangan dan pemanfaatan kesenian khususnya kesenian tradisional.
- b. Kurang tersedianya sarana prasarana aktifitas seni budaya seperti gor dan panggung hiburan.

18. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan sehingga belum terlihat kreatifitas pemuda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Masih kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat dan luntarnya jiwa nasionalisme.
- b. Masih belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dan pendidikan politik masyarakat.

20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan, yang mampu menjamin pembangunan daerah dan pengelolaan aset daerah.
- b. Belum optimalnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Tidak berjalannya pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat.
- e. Belum optimalnya pengembangan kemampuan kompetensi aparatur daerah.

21. Ketahanan Pangan

- a. Belum terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan guna peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan lumbung pangan masyarakat.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan desa

- a. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Belum siapnya Desa menyusun perencanaan sebagaimana amanat UU Desa.
- d. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dan desa dalam meningkatkan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga.

23. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan daerah.
- b. Belum optimalnya kinerja aparatur dibidang komunikasi dan informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.

24. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pelestarian dan penyimpanan arsip yang disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan kearsipan.

25. Keperpustakaan

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kegemaran membaca masyarakat.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan koleksi dan karya rekam terutama yang bernilai sejarah, hal ini disebabkan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan masih rendah.

26. Pertanian

- a. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikulutra serta perkebunan.
- b. Belum optimalnya produktivitas peternakan, baik ternak besar, kecil dan unggas.
- c. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti

dukungan permodalan bagi petani dan peternak, dukungan dari lembaga penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian.

- d. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya pertanian dan peternakan ramah lingkungan.
- e. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan.

27. Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan secara modern.

28. Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Belum optimalnya pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
- b. Masih terdapat rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani listrik.
- c. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan tanpa ijin (PETI).

29. Kehutanan

- a. Kurang termanfaatkannya hasil hutan non kayu dan jasa-lingkungan.
- b. Masih tingginya penggunaan lahan konservasi kawasan lindung untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.

30. Industri

- a. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.

31. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- b. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor.
- c. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif lapangan dan asongan
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.

32. Ketransmigrasian

- a. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaraan transmigrasi.

33. Pariwisata

- a. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata.
- b. Belum optimalnya destinasi wisata khususnya wisata yang potensial meningkatkan PAD.
- c. Kurangnya sarana dan prsarana pendukung pariwisata.
- d. Belum optimalnya kelompok kelompok pariwisata.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan apa yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi makroekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana, memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data/informasi dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

3.1.1 Kondisi Perekonomian

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi KSB, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan ekonomi daerah KSB dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB (tidak termasuk subsektor pertambangan nonmigas) yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor bangunan, sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi pendukung.

Kerangka ekonomi makro KSB, yang tercermin dari nilai PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2013 masih didominasi oleh kontribusi sektor primer, sedang kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB sangat kecil. PDRB KSB ADHB dan ADHK pada Tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

Data pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. menunjukkan bahwa Struktur PDRB KSB tahun 2013 termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas, didominasi oleh kontribusi sektor pertambangan/penggalan, yaitu 87,48% ADHB dan 84,19% ADHK, sedangkan kontribusi delapan sektor ekonomi lainnya sangat kecil, yaitu 12,52 % ADHB dan 15,81 % ADHK. Struktur PDRB KSB Tidak Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas, didominasi oleh tiga sektor ekonomi (pertanian dalam arti luas, bangunan dan perdagangan hotel restoran) dengan kontribusi 65,99 % ADHB dan 68,19 %

ADHK, sedangkan kontribusi enam sektor ekonomi lainnya relatif kecil yaitu 34,01 % ADHB dan 30,81 % ADHK.

Tabel 3.1.
PDRB KSB ADHB pada Tahun 2013

No.	Sektor Ekonomi	Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas		Tdk Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas	
		(Rp. Juta)	Persen (%)	(Rp. Juta)	Persen (%)
1	Pertanian	370.428,66	3,69	370.428,66	27,42
2	Pertambangan/ Penggalian	8.778.982,87	87,48	94.332,44	6,98
	a. Pertambangan Nonmigas	8.684.650,43	86,54	-	-
	b. Penggalian	94.332,44	0,94	94.332,44	6,98
3	Industri	27.391,47	0,27	27.391,47	2,03
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5.785,36	0,06	5.785,36	0,43
5	Bangunan	223.206,40	2,22	223.206,40	16,52
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	297.853,72	2,97	297.853,72	22,05
7	Pengangkutan dan Koumnikasi	147.724,93	1,47	147.724,93	10,94
8	Kuangan, Persewaaan & Jasa Perusahaan	42.287,85	0,42	42.287,85	3,13
9	Jasa-jasa	141.907,56	1,41	141.907,56	10,50
	Total	10.035.568,82	100,00	1.350.916,39	100,00

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Tabel 3.2.
PDRB KSB ADHK Tahun 2000 pada Tahun 2013

No.	Sektor Ekonomi	Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas		Tdk Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas	
		(Rp. Juta)	Persen (%)	(Rp. Juta)	Persen (%)
1	Pertanian	157.360,09	5,02	157.360,09	29,19
2	Pertambangan/ Penggalian	2.637.026,45	84,19	44.041,08	8,17
	a. Pertambangan Nonmigas	2.592.985,37	82,79	-	-
	b. Penggalian	44.041,08	1,41	44.041,08	8,17
3	Industri	14.722,04	0,47	14.722,04	2,73
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1.821,75	0,06	1.821,75	0,34
5	Bangunan	93.211,78	2,98	93.211,78	17,29
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	117.049,39	3,74	117.049,39	21,71
7	Pengangkutan dan Koumnikasi	56.724,94	1,81	56.724,94	10,52
8	Kuangan, Persewaan & Jasa	15.624,84	0,50	15.624,84	2,90

	Perusahaan				
9	Jasa-jasa	38.521,60	1,23	38.521,60	7,15
	Total	3.132.062,87	100,00	539.077,50	100,00

Sumber: BPS KSB dan BAPPEDA KSB, 2014.

Dengan jumlah penduduk KSB tahun 2013 sebanyak 121.167 jiwa, maka PDRB per kapita tahun 2013 sebagai berikut: Termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas ADHB Rp79.623.358 per kapita/tahun (Rp 6.635.280 per kapita/bulan) dan ADHK Rp 24.850.147 per kapita/tahun (Rp 2.070.846 per kapita/bulan), sedangkan tanpa termasuk subsektor pertambangan nonmigas ADHB Rp 10.718.342 per kapita/tahun (Rp 893.195 per kapita/bulan) dan ADHKRp 4.277.103 per kapita/tahun (Rp 356.425 per kapita/bulan). Data tersebut menunjukkan pendapatan per kapita penduduk KSB apabila termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas “sangat tinggi”, sedangkan apabila tidak termasuk Subsektor Pertambangan Nonmigas “rendah”. Rata-rata pendapatan per kapita yang disebutkan kedua terakhir (Rp 10.718.342 per kapita/tahun atau Rp 893.195 per kapita/bulan), itulah yang secara nyata menunjukkan pendapatan per kapita penduduk KSB tahun 2013.

Meski secara makro kondisi perekonomian nasional dan daerah KSB semakin membaik, namun perlu dicermati bahwa dinamika struktur pertumbuhan ekonomi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu mendorong struktur pertumbuhan yang lebih seimbang melalui peningkatan investasi. Upaya ini membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur atau sarana prasarana publik yang memadai dan perbaikan kondisivitas iklim investasi.

Berdasarkan RPJMD KSB tahun 2011-2015, maka tahun 2016 merupakan tahap pemantapan keunggulan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada Tahun 2016, kondisi perekonomian KSB diharapkan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan berkembangnya perekonomian regional maupun nasional. Pengembangan potensi ekonomi lokal KSB, terutama ekonomi pertanian dalam arti luas dan agribisnis/agroindustri, dilakukan melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dengan berbagai *stakeholders* pembangunan guna meningkatkan daya tarik investasi, dengan fokus sasaran pada peningkatan hubungan kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis.

Untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal KSB melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah Provinsi NTB dan ekonomi nasional, maka fokus sasaran pembangunan KSB tahun 2016 sebagai berikut:

1. Terbentuknya hubungan kerjasama atau kemitraan usaha antar daerah dan antar lembaga/pelaku ekonomi yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang/sektor ekonomi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana (infrastruktur) pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah.
3. Mempertahankan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangandan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan, serta upaya khusus (upsus) pangan pokok.
4. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi penggunaan pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna.
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penyediaan/perbaikan infrastruktur pariwisata yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Forum Kerjasama Pengembangan Ekonomi KSB dengan kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti: Regional Manajemen Pulau Sumbawa (RMPS), kerjasama Program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut), Kerjasama Model CMO, dan lainnya.
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan sentra produksi (KSP), terutama untuk pertanian arti luas, industri dan pariwisata;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui *One Stop Services* (OSS).
9. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.
10. Meningkatkan partisipasi sektor swasta/dunia usaha dalam pembangunan daerah, terutama bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

Beberapa arah kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung pembangunan ekonominasional dan regional, terutama lokal KSB pada masing-masing sektor ekonomi antara lain:

1. Peningkatan dan pengembangan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, domestik dan sebagian berorientasi ekspor, dengan disertai pengembangan sikap mental kewirausahaan dan daya saing pelaku UMKM.

2. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi dan hubungan fungsional antara sektor hulu dan ektor hilir.
3. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu dan berorientasi pada sistim agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan.
4. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi,kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung pengolahan hasil pertanian (agroindustri),perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
5. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan masyarakat, daerah, dan perbaikan distribusi pangan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2015 dan 2016

Tantangan dalam pembangunan perekonomian tahun 2015-2016 diperkirakan sebagai berikut:

1. Dampak pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian baik nasional, regional maupun daerah;
2. Tahun 2015 merupakan tahun politik dimana akan diselenggarakan Pemilu Kepala Daerah serentak yang dapat berpengaruh hingga kekondisi dan perkembangan sektor perekonomian;
3. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar local dan daya saing produk daerah;
4. Infrastruktur terutama pada sarana transportasi, listrik/energy dan air bersih belum memadai bagi pengembangan investasi baik dibidang industry dan perdagangan maupun pariwisata;
5. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian primer;
6. SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis dalam persaingan;
7. Masih diperlukan upaya yang komprehensif dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran;

8. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan, namun Pemerintah KSB selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah diperlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan Pinjaman daerah. PAD meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan meliputi: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun Realisasi, Plafond dan Proyeksi Pendapatan Daerah KSB Tahun 2013-2016 disajikan pada Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah KSB
Tahun 2013 s/d Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi		Plafon Tahun 2015	Proyeksi
		Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2016
I	Pendapatan Asli Daerah	27,962,831,697	42,509,446,245.27	52,554,421,339	52,554,421,339
1	Pajak daerah	14,912,704,177	15,421,676,531	13,350,000,000	13,350,000,000
2	Retribusi daerah	3,755,012,680	10,486,630,091	13,265,958,139	13,265,958,139
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/tidak dipisahkan	3,537,654,067	3,614,009,856	19,600,000,000	19,600,000,000
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5,757,460,773	12,987,129,767.27	6,338,463,200	6,338,463,200
II	Dana Perimbangan	383,247,465,686	498,875,270,206	578,869,942,198	578,869,942,198
1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	64,226,265,686	39,808,355,926	124,681,161,198	124,681,161,198
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	53,683,140,280		
3	Dana alokasi umum	272,959,410,000	349,283,834,000	380,327,621,000	380,327,621,000
4	Dana alokasi khusus	46,061,790,000	56,099,940,000	73,861,160,000	73,861,160,000
III	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	133,040,581,829	88,715,386,959.77	117,426,047,843	110,568,904,843
1	Pendapatan hibah	71,814,736,150	107,298,800	26,857,143,000	20,000,000,000
2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	32,158,200,679	52,878,115,159.77	33,845,529,399	33,845,529,399
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	29,067,645,000	35,729,973,000	45,403,190,000	45,403,190,000
4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	10,451,885,444	10,451,885,444
5	Lain-lain penerimaan	0,00	0,00	868,300,000	868,300,000
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	544,250,879,212.38	630,100,103,411	748,850,411,380	741,993,268,380

Sumber: DPPKD KSB, 2013-2015.

Catatan:

*) *Didalam perkembangannya akan terus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD, serta pagu belanja langsung sangat bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan kondisi pada waktu penyusunan KUA dan PPAS APBD.*

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah KSB mengarahkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2016 sebagai berikut:

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha dan koperasi.

2. Peningkatan koordinasi dan kinerja SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik SKPD perekonomian maupun SKPD fisik/teknis.
3. Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset-asset daerah ke arah yang lebih produktif.
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen usaha BUMD seperti: Perusahaan Daerah, PDAM, dan lainnya.
5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia/aparat perencana dan pengelola pendapatan daerah.
6. Pengembangan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah yang lebih cepat dan tetap.
7. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan berkesinambungan.
8. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan menempuh upaya-upaya antara lain:
 - a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - b. Dana DAK yang direncanakan meningkat jumlahnya secara signifikan tahun 2016, diupayakan penggunaannya melalui penyusunan program dan kegiatan unggulan strategis daerah agar memberikan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 - c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang dibiayai dengan pajak.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah, serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan

efisiensi alokasi anggaran daerah. Realiasi, PlafondanProyeksi proyeksi belanja daerah KSB tahun 2013-2016 diajikan pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4.
Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah KSB
Tahun 2013 s/d Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi		PlafonTahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
		Tahun 2013	Tahun 2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)	243,806,453,081	294,691,219,846	371,684,800,000	365,244,719,147
1	Belanja pegawai	200,328,880,133	235,858,425,724	314,639,772,814	314,639,772,814
2	Belanja bunga	0,00	0,00		
3	Belanja subsidi	1,413,090,420	417,653,022	500,000,000	500,000,000
4	Belanja hibah	20,219,094,085	37,049,782,744	21,445,905,027	16,005,824,174
5	Belanja bantuan sosial	4,185,635,148	3,580,768,325	3,026,288,099	3,026,288,099
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	17,335,951,395	17,256,545,531	29,572,834,060	29,572,834,060
7	Belanja tidak terduga	323,801,900	528,044,500	2,500,000,000	1,500,000,000
II	Belanja Langsung	282,917,003,324	4,021,573,876	371,110,611,380	365,543,952,209
1	Belanja pegawai	18,372,192,244	14,673,810,837	15,718,388,910	15,482,613,076
2	Belanja barang dan jasa	91,919,580,495	94,901,791,359	146,990,659,630	144,785,799,736
3	Belanja modal	172,625,230,585	214,445,971,680	208,401,562,840	205,275,539,397

Sumber: DPPKD KSB, 2015.

Catatan:

*) *Didalam perkembangannya akan terus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD, serta pagu belanja langsung sangat bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan kondisi pada waktu penyusunan KUA dan PPAS APBD.*

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2016 diarahkan kepada:

1. Penyusunan alokasi belanja dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerjayang berorientasi kepada pencapaian hasil (*output*) dari pembiayaan (*input*) program/kegiatan yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja daerah adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD secara obyektif dan rasional dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusan dan tanggung jawab masing-masing SKPD.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh setiap SKPD.
4. Besarnya plafon anggaran pada setiap SKPD harus realistis, yaitu disesuaikan dengan kondisikemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah

serta pertimbangan kinerja masing-masing SKPD.

5. Penentuan kebijakan belanja daerah juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor/kegiatan strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
7. Dalam kerangka kebijakan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi dengan kajian ilmiah terhadap masa produktif usaha dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah KSB tahun 2016 diarahkan untuk:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:
 - a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2016.
 - b. Penerimaan pinjaman pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan dan Dana Bergulir.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:
 - a. Menyisihkan SILPA untuk pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk perbaikan kinerja.

Tabel berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 3.5.
Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah KSB Tahun 2013-2016

No	Uraian	Realisasi		Rencana Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
		Tahun 2013	Tahun 2014		
I	Penerimaan pembiayaan				
1	SiLPA	9,454,482,426.89	12,418,108,473	945,000,000	945,000,000
2	Pencairan Dana Cadangan	-		-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-		-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-		-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	226,666,667	443079233	-	-
6	Penerimaan piutang daerah			-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,172,149,093.89	12,861,187,706	945,000,000	945,000,000
II	Pengeluaran pembiayaan				
1	Pembentukan dana cadangan	-		-	-
2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6,020,750,000	5,884,006,125	7,000,000,000	7,000,000,000
3	Pembayaran pokok utang	-		-	-
4	Pemberian pinjaman daerah	-		-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,020,750,000	5,884,006,125	7,000,000,000	7,000,000,000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	3,402,424,744	6,977,181,581	(6,055,000,000)	(6,055,000,000)

Sumber: DPPKD KSB, 2015.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan KSB Tahun 2011-2015 (lima tahun Tahap II) adalah *"Kabupaten Sumbawa Barat Berkembang melalui Pembangunan Agroindustri Andalan"*. Agroindustri Andalan adalah industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan & kelautan) yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat sebagai pelaku usaha dan pendapatan wilayah KSB secara keseluruhan. Agroindustri merupakan pemicu dan sekaligus pemacu dalam pembangunan agribisnis, yaitu mempunyai keterkaitan ke belakang dalam mendorong pembangunan sektor hulu (penyediaan input dan usaha pertanian) dan mempunyai keterkaitan ke depan dalam mendorong pembangunan sektor hilir (pemasaran hasil pertanian dan hasil agroindustri) dengan dukungan berbagai kelembagaan penunjang agribisnis.

Untuk mewujudkan visi pembangunan dan sekaligus visi daerah KSB, maka ditetapkan misi pembangunan KSB Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi geografis dan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumberdaya dan integritas ekosistem wilayah yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan perekonomian wilayah dengan mengintegrasikan keunggulan sektor pertanian dan industri secara efisien, efektif dan produktif, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Mengembangkan pranata sosial budaya, tata nilai keagamaan dan kelembagaan yang mampu menstimulasi pengembangan sumberdaya manusia yang beriman taqwa (IMTAQ), bersikap mental wirausaha, kreatif, inovatif, partisipatif dan produktif dalam pembangunan.
4. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan sebagai syarat harus dalam berproduksi dan berkonsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan berlandaskan tata nilai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang arif-bijaksana (*Sound Governance*).

Visi Daerah/Pembangunan KSB yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah “*Terwujudnya Keunggulan Sumberdaya Wilayah untuk mendukung Kemantapan Pembangunan Agroindustri Andalan Kabupaten Sumbawa Barat*”.

Untuk mewujudkan visi daerah/pembangunan KSB, maka ditetapkan Misi Pembangunan KSB untuk penyusunan RKPD Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam dan integritas ekosistem wilayah yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan perekonomian dengan memadukan keunggulan pertanian dan industri, sehingga tercipta agroindustri yang mampu memperluas kesempatan kerja dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Mengembangkan sumberdaya manusiayang beriman taqwa (IMTAQ), bersikap mental wirausaha, partisipatif dan produktif dalam pembangunan berlandaskan tata nilai keagamaan dan kearifan sosial budaya lokal.
4. Mengembangkan sarana prasarana pembangunanyang mampu memenuhi kebutuhanberproduksi dan berkonsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan berlandaskan tata nilai pemerintahan yang baik (*Good Governance*)dan pemerintahan yang arif-bijaksana (*SoundGovernance*).

Untuk mewujudkan visi dan menjabarkan misi pembangunan KSB yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pembangunan KSB Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) sesuai arahan penggunaan terbaik.
2. Mengatur pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) sesuai azas manfaat dan daya dukung.
3. Menumbuhkan ekonomi rakyat (UMKM dan koperasi), berupa industri/agroindustri kecil dan rumahtangga dengan menggunakan keunggulan sumberdaya pertanian.
4. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha/investor agar mampu berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi wilayah KSB.
5. Mempedomani tata nilai agama dan kearifan sosial budaya lokal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman taqwa (IMTAQ), bermental wirausaha dan partisipatif dalam pembangunan wilayah.

7. Membangun sarana prasarana sosial ekonomi dan teknologi berbasis pemanfaatan keunggulan sumberdaya lokal untuk mendukung kegiatan berproduksi yang berkelayakan ekonomi.
8. Membangun sarana prasarana sosial budaya berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kegiatan berkonsumsi yang berkelayakan sosial.
9. Menciptakan tata pemerintahan yang transparan, demokratis dan akomodatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
10. Menghasilkan aparatur pemerintahan yang profesional, disiplin, arif-bijaksana dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran umum pembangunan KSB tahun 2016 sebagai berikut:

1. Tersedianya Kawasan Sentra Produksi (KSP) komoditas unggulan/andalan pada bagian wilayah atau setiap kecamatan.
2. Intensifnya penggunaan lahan sawah untuk budidaya tanaman pangan.
3. Ekstensif dan/atau intensifnya pengusahaan lahan kering untuk budidaya pertanian dan peternakan melalui pendekatan KSP dan sistem agribisnis.
4. Terpeliharanya kawasan/lahan hutan, sehingga fungsi lingkungan/lindung, ekonomi dan sosial hutan terjamin.
5. Terbangunnya obyek pariwisata alam strategis “Pantai Jelenga-Maluk-Sekongkang” dan obyek pariwisata lainnya pada setiap kecamatan.
6. Tersedianya Zonasi dalam pengelolaan sumberdaya perairan, baik untuk perairan laut, air payau/pesisir, maupun air tawar/darat pada setiap kecamatan.
7. Diusahakannya berbagai komoditas pertanian dan peternakan unggulan/ andalan pada setiap KSP, baik pada lahan sawah maupun lahan kering.
8. Tertatanya kegiatan ekonomi non pertanian (seperti: pertambangan/ penggalian, industri, perdagangan, koperasi dan jasa lainnya) secara rasional, produktif dan komersial.
9. Terjadinya peningkatan PDRB dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta diikuti meningkatnya indeks pendapatan (paritas daya beli) masyarakat pada IPM.
10. Tertatanya hubungan kerjasama pembangunan antara Pemerintah KSB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi se-Provinsi NTB.
11. Tertatanya hubungan kerjasama pembangunan antara Pemerintah KSB dengan Pemerintah Kabupaten-Kota/Pemerintah Provinsi atau lembaga lainnya di luar Provinsi NTB.

12. Terciptanya hubungan kerjasama atau kemitraan usaha antar pelaku ekonomi di KSB.
13. Terbinanya lembaga keagamaan, hukum dan sosial budaya lokal.
14. Adanya perlindungan hukum dan penegakan hak azasi manusia, yang ditandai oleh terselesaikannya secara baik kasus pelanggaran hukum dan hak azasi manusia.
15. Terciptanya stabilitas sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi, yang ditandai sedikitnya konflik kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
16. Meningkatnya kualitas pendidikan dan/atau keterampilan sumberdaya manusia KSB, serta dihasilkannya angkatan kerja terampil dan bersikap mental wirausaha.
17. Meningkatnya kualitas kesehatan sumberdaya manusia KSB.
18. Terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja dan menurunnya jumlah penduduk miskin.
19. Meningkatnya kapasitas sarana prasarana sosial ekonomi dan teknologi pertanian dalam arti luas.
20. Meningkatnya kapasitas sarana prasarana sosial ekonomi dan teknologi non pertanian (seperti: energi/listrik dan air bersih; perhubungan darat, laut, dan udara; teknologi, informasi dan komunikasi, dan lain-lainnya).
21. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penerapan teknologi pada kegiatan berbagai sektor ekonomi pembangunan, sehingga tercipta efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha.
22. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.
23. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan.
24. Tersedianya sarana prasarana sosial budaya lainnya (seperti; peribadatan, olahraga dan kesenian, dan lainnya).
25. Tertatanya lembaga dan ketatalaksanaan pemerintahan.
26. Tersedianya peraturan, keputusan dan kebijakan Pemerintah untuk kesejahteraan sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat.
27. Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) antar lembaga pemerintahan (eksekutif dan legeslatif) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan.
28. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dan disiplin.
29. Terciptanya aparatur pemerintahan yang fitrah/bersih, baik dan bertanggung jawab.

30. Terwujudnya aparaturnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara arif-bijaksana kepada masyarakat.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Program Utama Pembangunan Daerah

Pada tahun 2016 secara nasional dan regional masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan strategis nasional maupun regional tersebut. Arah kebijakan umum juga memperhatikan isu global yang berkembang, yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDG's). Selain itu, pembangunan daerah juga harus memperhatikan strategi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga terjadi sinergitas kebijakan antar tingkat pemerintahan.

Secara garis besar capaian kinerja pemerintah dan program strategis di tingkat nasional diantaranya adalah: 11 Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 Prioritas lainnya, Masterplan Percepatan *Four Track Strategy* yang fokus pada program *pro job, pro poor, pro growth, dan pro environment*. Maka isu-isu strategis nasional tahun 2016 antara lain:

1. Perwujudan *Good and Clean Governance* yang semakin kuat;
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran;
3. Terjadinya krisis energi nasional karena semakin terbatasnya energi fosil yang dapat berdampak pada produktivitas masyarakat dan produktivitas daerah serta menyebabkan rendahnya daya tarik daerah bagi investor;
4. Penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam;
5. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah;
6. Masih tingginya ancaman Stabilitas Keamanan dan Ketentraman masyarakat;
7. Penanggulangan bahaya Narkoba;
8. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
9. Penurunan Hambatan Perdagangan Antar Daerah;
10. Kesejahteraan dan Kesenjangan Gender;
11. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
12. Tingginya angka kelahiran;
13. Tingginya angka kematian ibu dan bayi;
14. Kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi.

Penentuan program pembangunan daerah KSB Tahun 2011-2015, termasuk didalamnya Tahun 2016, dilakukan dengan mempertimbangkan dan/atau berpedoman kepada beberapa Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah KSB, Kebijakan Pembangunan dan Ketentuan Hukum lainnya sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuan MDGs yang harus dicapai hingga tahun 2016 sebagai berikut: (a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (b) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (c) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) menurunkan angka kematian anak, (e) meningkatkan kesehatan ibu, (f) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (g) menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan (h) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
2. Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2014-2019. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
5. Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018. Berdasarkan PERDA Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013, terdapat beberapa Program Terobosan Pemerintah Provinsi NTB antara lain: (a) Program terobosan bidang sosial: anggaran pendidikan 20 %, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin, mencanangkan gerakan AKINO, ABSANO dan ADONO, kesehatan dan Desa Siaga; (b) Program terobosan bidang infrastruktur: pembentukan Kampung Media, pembentukan Desa Mandiri Energi, Gerakan NTB Hijau, Gerakan Kawasan Permata, Gerakan Ruang Hijau, sarana prasarana perhubungan darat dan udara; (c) Program terobosan bidang ekonomi dan rumpun hijau: penerapan system *One Gate Service* Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), pencanangan Visit Lombok-Sumbawa 2012, Pencanangan Bumi Sejuta Sapi, Menciptakan 100 ribu wirausaha baru, program Desa Mandiri Pangan, revitalisasi penyuluhan, Gerakan Gemar Makan Ikan, Pasar Tani, kemitraan usaha; dan (d) Program terobosan bidang pemerintahan, pemantapan otonomi daerah dan reformasi birokrasi: kunjungan kerja keseluruh kabupaten/kota, sharing pelayanan

pendidikan dan kesehatan, penancangan pemakaian PIN Anti Korupsi KPK, Fakta Integritas bagi pejabat struktural, dan menerapkan *e-Procurement* untuk transparansi pengadaan barang dan jasa.

6. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KSB Tahun 2006-2025, yang berisi tentang Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dalam Jangka Panjang 20 Tahun.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD KSB Tahun 2011-2015 (terutama Bab X: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN), disebutkan bahwa rancangan program dan kegiatan pembangunan satu tahun setelah periode RPJMD berakhir (yaitu tahun 2016) yang dituangkan dalam bentuk RKPD Tahun 2016, berisi: (a) Agenda menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan Tahap II (2011-2015), (b) Mengatasi masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani hingga Tahun 2015, dan (c) Mengantisipasi masalah-masalah pembangunan yang mungkin dihadapi Tahun 2016.
8. Kebijakan Bupati KSB tentang Pemenuhan Sembilan Kebutuhan Dasar Masyarakat KSB, meliputi: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, rasa aman, rasa nyaman, dan rasa senang.
9. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) KSB Tahun 2015 yang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 ini.

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan di atas, maka Program Utama Pembangunan KSB yang menjadi pedoman dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Keunggulan Sumberdaya Alam untuk Pengembangan Pertanian Dalam Arti Luas dan Penumbuhan Aktivitas Pariwisata.
2. Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral ((listrik, gas dan air bersih, bahan tambang/galian) sesuai Azas Manfaat dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
3. Pengembangan UMKM dan koperasi, terutama industri/agroindustri kecil dan rumah tangga dengan dukungan keunggulan sumberdaya pertanian dan sektor ekonomi lainnya.
4. Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan Usaha antar Pelaku Ekonomi untuk mendukung keunggulan UMKM dan Koperasi.
5. Penataan Kehidupan Sosial Budaya, Keagamaan dan Kelembagaan untuk Menjamin Rasa Aman dan Memantapkan Fondasi Peradaban Fitrah.

6. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan sumberdaya manusia agar dapat berpartisipasi maksimal dalam pembangunan.
7. Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Teknologi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan berproduksi bagi produsen/dunia usaha.
8. Pembangunan Infrastruktur Sosial Budaya dan Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintahan.
9. Penataan Kelembagaan Pemerintahan melalui penataan struktur organisasi, serta pembenahan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD.
10. Penataan Reformasi Birokrasi melalui pembinaan pejabat dan pegawai agar profesional, disiplin dan bertanggung jawab dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat (*Public Service*).

4.2.2. Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada setiap Program Utama Pembangunan ditentukan satu Kegiatan Prioritas Pembangunan KSB tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pengusahaan komoditas unggulan/andalan pertanian arti luas pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) sekaligus menumbuhkan aktivitas agro-ekowisata seperti: Agribisnis Sapi di RPH-Poto Tano, Agribisnis Rumput Laut di Kertasari, Agribisnis Sisal di Kecamatan Sekongkang, Aneka Jenis Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, serta Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
2. Pembinaan pelaku usaha energi dan sumberdaya mineral (listrik, gas dan air bersih, serta pertambangan/penggalan) dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sekaligus memelihara/menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Pemberdayaan Pelaku UMKM dan Koperasi, terutama industri/agroindustri kecil dan rumah tangga dengan dukungan keunggulan sumberdaya pertanian arti luas dan sektor ekonomi lainnya.
4. Implementasi hubungan kerjasama/kemitraan usaha antar Pelaku Ekonomi (Agribisnis dan Agroindustri serta Pariwisata), baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.
5. Pembinaan tata nilai keagamaan, sosial budaya dan kelembagaan Pembangunan Berbasis Rukun Tentangga (PBRT) kepada masyarakat untuk memantapkan fondasi peradaban fitrah.
6. Pembinaan kualitas pendidikan dan kesehatan sumberdaya manusia agar dapat bekerjasama dan berpartisipasi maksimal dalam pembangunan.

7. Pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian dan prasarana perhubungan, terutama pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian Dalam Arti Luas dan lokasi obyek wisata.
8. Pengadaan dan/atau penataan permukiman, sanitasi dan lingkungan Perkantoran Pemerintah.
9. Pembentukam struktur organisasi pemerintahan, serta pembenahan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kapasitas aparatur, yang diikuti pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*funishment*) kepada apartur.

4.2.3. Tema Pembangunan KSB Tahun 2016

Tema Pembangunan KSB Tahun 2016 adalah ***“Pemantapan Agroindustri Andalan melalui Pemanfaatan Keunggulan Sumberdaya Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat”***.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian Anggaran Belanja Pembangunan masing-masing SKPD disajikan pada **Tabel 5.1.** berikut.

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	111,364,890,000
2	Dinas Kesehatan	67,328,417,490
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat	34,845,500,000
4	Dinas Pekerjaan Umum	750,782,359,620
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,775,000,000
6	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	72,120,710,808
7	Badan Lingkungan Hidup	45,630,000,000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,949,810,000
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3,613,200,000
10	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,826,500,000
11	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2,507,415,000
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,761,000,000
13	Satuan Polisi Pamong Praja	17,173,011,760
14	Sekretariat Daerah	19,281,179,071
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,809,600,000
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	9,950,610,400
17	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6,511,500,000
18	Inspektorat Kabupaten	2,840,000,000
19	Kantor Camat Taliwang	4,306,000,000
20	Kantor Camat Seteluk	755,000,000
21	Kantor Camat Jereweh	788,800,000
22	Kantor Camat Brang Rea	750,000,000
23	Kantor Camat Sekongkang	750,000,000
24	Kantor Camat Poto Tano	700,000,000
25	Kantor Camat Brang Ene	727,000,000
26	Kantor Camat Maluk	892,100,000
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,668,800,000
28	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2,287,180,500
29	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	750,000,000
30	Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	3,500,000,000
31	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6,931,000,000
32	Kantor Arsip dan Perpustakaan	1,450,668,534
33	Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian	34,230,000,000
34	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	14,230,095,000
35	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,817,600,000
36	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	26,735,000,000
37	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	17,602,500,000
JUMLAH		1,313,942,448,183

Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung oleh masing-masing SKPD. Adapun rincian Program dan Kegiatan pada setiap SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 disajikan pada **Tabel 5.2.** berikut.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KSB Tahun 2016 menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan penyusunan KU dan PPAS APBD tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, sehingga tercapai sinergitas pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman SKPD dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun kerangka pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KSB Tahun Anggaran 2016. Dalam rangka mengupayakan sinkronisasi, keterpaduan dan harmonisasi pelaksanaan program melalui koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD setelah menerima pagu sementara Tahun 2016, perlu menyesuaikan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
2. Diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KSB Tahun 2016 dapat mendorong penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengevaluasi program dan indikator capaian makro melalui laporan Kepala SKPD, sedangkan untuk mengetahui keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan dimaksud.